



**MEMORANDUM AKHIR JABATAN
MENTERI PERTANIAN
KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN
MASA BAKTI MEI 1998-OKTOBER 1999**

**DEPARTEMEN PERTANIAN
Jakarta
1999**





KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dalam kondisi yang penuh tantangan seperti kita hadapi ini, pertanian telah mampu berperan sebagai katup pengaman dan sektor andalan dalam pembangunan nasional. Peran tersebut terutama dalam penyediaan pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penciptaan kesempatan kerja di pedesaan.

Kabinet Reformasi Pembangunan memulai masa kerjanya di tengah-tengah kondisinya krisis, yang dimulai dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi. Untuk sektor pertanian, permasalahan diperberat lagi dengan adanya musim kemarau yang panjang. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, salah satu tugas utama sektor pertanian adalah memantapkan ketahanan pangan dan memberdayakan ekonomi rakyat (petani, peternak dan nelayan).

Untuk mengemban tugas tersebut dalam tempo yang relatif singkat jajaran Departemen Pertanian kembali mencoba menajamkan kebijakan, dan program-program pembangunan pertanian. Diantaranya telah dicetuskan agenda reformasi pembangunan pertanian dan kebijakan operasional yang dituangkan dalam bentuk Gerakan Mandiri (Gema), yaitu Gema Palagung 2001, Gema Hortina 2003, Gema Proteina 2001, dan Protekan 2003. Melalui program-program tersebut alhamdulillah berbagai sasaran pembangunan pertanian dapat dicapai dengan baik.



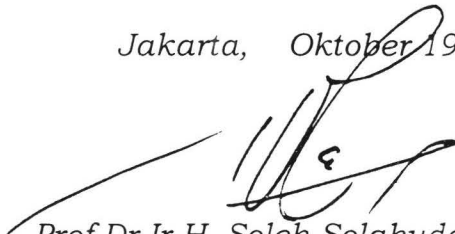
Dalam periode masa bakti Kabinet Reformasi Pembangunan Mei 1998 – Oktober 1999 yang singkat ini, saya beserta seluruh jajaran Departemen Pertanian di Pusat dan Daerah telah berusaha dan bekerja keras agar mandat yang diberikan dapat diemban dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Ir. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia atas kepercayaan dan petunjuk yang telah diberikan kepada saya selama memimpin Departemen Pertanian.

Penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh jajaran pertanian terutama para petani, peternak, nelayan dan dunia usaha sebagai pelaku utama pembangunan pertanian atas pengabdianya dan kerja keras yang tidak mengenal lelah dalam membangun pertanian. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua instansi di tingkat Pusat dan Daerah, media massa dan semua pihak atas kerja sama yang sangat baik selama ini.

Akhirnya perkenankanlah saya mengajak kepada seluruh jajaran pertanian untuk bertekad terus meningkatkan upaya pembangunan pertanian agar lebih mampu memberikan sumbangan positif seperti yang didambakan oleh bangsa Indonesia.

Terima kasih dan selamat bekerja.

Jakarta, Oktober 1999


Prof.Dr.Ir.H. Soleh Solahuddin, MSc





Prof. Dr. Ir. H. Soleh Solahuddin, MSc.

MENTERI PERTANIAN
KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN ERA REFORMASI	3
1. Peran Pertanian Selama ini	3
2. Peran Pertanian Pada Era Reformasi	4
3. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pertanian	6
4. Agenda Reformasi Pembangunan Pertanian	8
5. Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi	11
6. Program Pembangunan Pertanian	20
III. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PERTANIAN	22
1. Pembinaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pembinaan Hukum	22
2. Pembinaan Pegawai	28
3. Perkembangan Aset	30
4. Pengelolaan Anggaran	31
IV. KERAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	34
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	34
2. Peternakan	40
3. Perikanan	45
4. Agribisnis	47
5. SDM Pertanian	50
6. Penelitian dan Pengembangan Pertanian	53
V. SUMBANGAN PEMIKIRAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	64
1. Permasalahan dan Tantangan	64
2. Peluang dan Potensi Pembangunan Pertanian	68
3. Alternatif Kebijakan Atas Beberapa Aspek Pembangunan Pertanian	68
4. Fokus Pembangunan Pertanian	78
5. Hal-hal Yang Memerlukan Perhatian Khusus	81
VI. PENUTUP	99
LAMPIRAN	101



I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis ekonomi dan politik yang melanda negara saat ini ialah melaksanakan reformasi total. Reformasi yang dimaksud ialah pembaharuan, penyempurnaan dan penataan ulang seluruh pranata sosial ekonomi, politik dan hukum berdasarkan prinsip demokrasi dan transparansi untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan beradab. Dengan pengertian demikian, reformasi total akan berarti upaya penyempurnaan terhadap seluruh pranata pembangunan di seluruh sektor, termasuk sektor pertanian.

Seluruh komponen bangsa menyadari perlunya upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi krisis ini. Melalui penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 telah dirumuskan acuan utama bagi penanganan masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, antara lain dituangkan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang "*Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara*". Ketetapan MPR ini antara lain mengamanatkan Kebijakan Reformasi Pembangunan bidang ekonomi bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya (1) nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar, (2) tersedianya kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau, dan (3) berputarnya roda perekonomian nasional.

Untuk melaksanakan Ketetapan MPR tersebut, diperlukan penjabaran ke dalam kebijakan dan langkah-langkah operasional berupa terobosan-terobosan yang sifatnya reformis sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya juga memerlukan reorientasi dan reformasi. Oleh karena merupakan sektor yang keragaannya sangat mempengaruhi perikehidupan penduduk Indonesia secara umum, dan penduduk pedesaan serta lapisan terbawah secara khusus, maka reformasi di sektor pertanian harus dilakukan secara bertahap



II. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN ERA REFORMASI

1. Peran Pertanian Selama ini

Secara umum pada periode Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) sektor pertanian dinilai telah berhasil melaksanakan peran-peran konvensionalnya, seperti menghasilkan bahan pangan bagi penduduk, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan input bagi sektor Industri, membentuk modal investasi untuk pembangunan sektor-sektor lainnya, dan menghasilkan devisa melalui ekspor.

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai selama lebih dari 30 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 7 persen per tahun, proses transformasi struktural perekonomian nasional berjalan secara berkelanjutan dan mengarah kepada struktur ekonomi berimbang. Gejala ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya pangsa relatif sektor-sektor primer termasuk sektor pertanian dan meningkatnya pangsa relatif sektor-sektor sekunder dan tertier dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, penurunan pangsa PDB sektor pertanian tidak diikuti secara berimbang dengan penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja. Hal ini berakibat semakin rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja sektor lainnya.

Sektor pertanian telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan sektor-sektor sekunder dan tertier, melalui harga pangan murah; dimana pangan merupakan komoditas penentu tingkat upah. Karena pangan merupakan komponen utama dari pengeluaran yang menentukan tingkat upah pada sektor sekunder dan tertier, maka kebijakan menyediakan pangan murah menjadikan sektor-sektor tersebut dapat memanfaatkan tenaga kerja dengan upah rendah sehingga dapat tumbuh lebih pesat.



Peranan sektor pertanian dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan pedesaan kiranya tidak dapat dianggap kecil. Pembinaan kelembagaan dengan azas wilayah produksi sehamparan yang dimulai pada PJP I menjadi cikal bakal perkembangan satuan kelembagaan agribisnis di kemudian hari. Di samping itu pembinaan kelompok-kelompok tani dapat pula dilihat sebagai suatu upaya mengintegrasikan pendekatan regional dengan pendekatan sektoral. Namun demikian, dengan adanya keharusan pengembangan satu bentuk koperasi di pedesaan yang seringkali keberadaannya dipaksakan, kemandirian petani dan kelompok tani untuk melaksanakan usahanya dengan prinsip-prinsip bisnis tidak dapat terbina dengan baik.

Kegiatan pembangunan pertanian terutama di wilayah pedesaan telah pula memberikan andil yang besar dalam upaya memerangi kemiskinan. Jumlah relatif penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dilaporkan secara konsisten terus menurun, baik secara absolut maupun persentase. Namun demikian, karena krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997-1998, maka hasil jerih payah ini secara drastis tersapu sehingga pedesaan kembali menjadi kantong-kantong kemiskinan, terutama dengan adanya de-urbanisasi penduduk perkotaan yang tadinya bergerak di sektor informal. Namun demikian, dalam suasana krisis ekonomi ini, pertanian telah berperan sebagai katup pengaman. Secara nasional, sektor ini masih dapat tumbuh positif, dan secara regional sektor ini diminta menampung tambahan tenaga kerja yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan.

2. Peran Pertanian Pada Era Reformasi

Sektor pertanian memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Dalam era reformasi, sektor ini diharapkan untuk berperan di garis depan dalam mengatasi krisis ekonomi. Dengan peran strategis tersebut, sektor pertanian patut menjadi sektor andalan dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Pertama, sektor pertanian merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, karena hampir setengah dari angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor ini. Hal ini berarti upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia akan lebih efektif dilakukan melalui pembangunan pertanian. Namun demikian, pada era reformasi ini pendekatan pembangunan pertanian dalam hal ketenagakerjaan bukan lagi penciptaan lapangan kerja dari sisi kuantitas saja, tetapi diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif yang mampu memberikan upah atau imbalan pendapatan yang layak dan sebanding dengan sektor-sektor lainnya.

Kedua, sektor pertanian merupakan penghasil bahan makanan pokok, sementara itu ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Dalam kondisi perekonomian global maupun domestik yang tidak stabil, ketahanan pangan yang paling mantap ialah melalui pencapaian swasembada. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan untuk mewujudkan, memulihkan, dan mempertahankan swasembada merupakan upaya strategis untuk memantapkan ketahanan pangan dan sekaligus ketahanan nasional.

Ketiga, sektor pertanian masih tetap menempati posisi penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional. Lebih dari itu, sektor pertanian memiliki keunggulan khas dari sektor-sektor lain dalam perekonomian, antara lain: (a) produksi pertanian berbasis pada sumberdaya domestik, kandungan impornya rendah dan relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian eksternal, dan (b) produk pertanian yang berbasis sumberdaya alam relatif lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi makro, seperti gejolak moneter, nilai tukar maupun fiskal. Dengan demikian, upaya mempertahankan dan meningkatkan peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Hal ini telah terbukti dari fakta empiris, di saat Indonesia menghadapi krisis dan secara nasional mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif, hanya sektor pertanianlah yang tumbuh positif.



Keempat, sektor pertanian merupakan penyumbang devisa yang relatif besar dan ternyata cukup lentur dalam menghadapi gejolak moneter dan krisis ekonomi. Oleh karena produksinya berbasis pada sumberdaya domestik, maka ekspor produk pertanian relatif lebih tangguh yang terbukti dengan ekspor pertanian yang relatif stabil dengan penerimaan ekspor yang meningkat pesat pada saat krisis ini. Tersedianya devisa yang cukup merupakan syarat untuk dapat mengimpor barang produksi dan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan demikian, melalui sumbangan devisa yang relatif besar dan stabil, sektor pertanian telah berperan positif dalam memantapkan ketahanan ekonomi nasional.

3. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pertanian

Untuk melaksanakan peran strategis sebagaimana diuraikan di atas, sektor pertanian berupaya untuk terus memperbaiki kinerja pembangunannya. Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat pertanian, khususnya memberdayakan petani, peternak dan nelayan, agar mampu melaksanakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dan selanjutnya mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Pemerintah melaksanakan perannya sebagai stimulator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani, peternak dan nelayan, agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan peran tersebut visi, misi dan tujuan yang jelas dirumuskan berikut ini.

Visi pertanian memasuki abad 21 adalah *pertanian modern, tangguh dan efisien*. Dengan visi pertanian seperti tersebut, maka visi Departemen Pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional adalah untuk terwujudnya *masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan pertanian yang selaras dengan alam*.

Untuk mewujudkan visi pertanian tersebut, misi pembangunan pertanian adalah *memberdayakan petani, peternak dan nelayan menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan*. Sejalan dengan visi tersebut, misi Departemen Pertanian adalah :



- 1) Mengamankan ketersediaan pangan dan hasil-hasil pertanian lainnya secara berkelanjutan dalam upaya memantapkan ketahanan pangan nasional.
- 2) Menciptakan peluang ekonomi bagi pengembangan agribisnis dan ekonomi pedesaan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani dan penduduk pedesaan.
- 3) Melestarikan sumberdaya alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
- 4) Memberdayakan sumberdaya manusia pertanian agar mampu berperan dalam era global
- 5) Mengembangkan teknologi pertanian strategis dan ramah lingkungan.
- 6) Menyelaraskan saling ketergantungan kegiatan pertanian antar wilayah dan antar sektor menuju terciptanya struktur ekonomi nasional yang handal.

Wujud pertanian seperti itu akan dapat dicapai melalui program-program pembangunan pertanian dengan strategi :

- 1) Meningkatkan optimasi pemanfaatan sumberdaya domestik, yang merupakan modal dasar pembangunan yang sangat berharga dan mempunyai potensi yang sangat besar. Keunggulan dari kekayaan sumberdaya domestik ini telah teruji, baik pada saat krisis maupun dalam keadaan normal. Sumberdaya domestik yang dimiliki yaitu lahan, air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi.
- 2) Memperluas spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumberdaya, produksi dan konsumsi. Melalui upaya ini, keragaman sumberdaya, tahapan kemajuan pembangunan, serta kondisi sosial-budaya di setiap wilayah dijadikan referensi dalam setiap upaya pengembangan wilayah tersebut, sehingga dicapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan harmonis.
- 3) Meningkatkan penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi dan tepat guna. Teknologi yang diterapkan tidak harus selalu hasil dari karya penelitian lingkup Departemen Pertanian saja, tetapi juga dari lembaga lainnya, baik pemerintah ataupun swasta, dan baik dari dalam negeri, ataupun internasional. Melalui pendekatan ini percepatan pembangunan pertanian yang didukung oleh pemanfaatan teknologi akan dapat diwujudkan.



- 4) Meningkatkan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani sebagai produsen dan masyarakat konsumen secara berimbang.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan pembangunan pertanian pada era reformasi terfokus kepada upaya untuk:

- 1) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan.
- 2) Meningkatkan ketahanan pangan nasional.
- 3) Menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor.
- 4) Meningkatkan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien di bidang agribisnis.
- 5) Meningkatkan kemandirian petani-nelayan dan pemberdayaan kelembagaan serta prasarana pertanian.

4. Agenda Reformasi Pembangunan Pertanian

a. Penjabaran Ketetapan MPR 1998 Hasil Sidang Istimewa

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertanian dilaksanakan guna mewujudkan amanat rakyat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang, yang telah dirumuskan melalui Sidang Istimewa MPR. Ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa No. X/MPR/1998, memuat amanat untuk memulihkan kembali perekonomian nasional yang sedang terpuruk dalam jangka waktu yang singkat. Dari berbagai butir agenda kebijakan bidang ekonomi yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998, butir-butir yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi Departemen Pertanian adalah (sesuai dengan bunyi dalam Ketetapan tersebut):

- Menyediakan sembilan bahan pokok dan obat-obatan yang cukup dan terjangkau oleh rakyat, baik melalui peningkatan produksi dalam negeri maupun impor. Golongan miskin, khususnya yang tidak memiliki daya beli, menjadi prioritas utama melalui kebijakan subsidi yang terarah. Kebijakan dan program diversifikasi pangan diperluas sehingga dapat mengurangi ketergantungan pangan rakyat hanya kepada beras.



- Menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama kegiatan-kegiatan yang berbasis pada ekonomi rakyat dan berorientasi ekspor, sebagai dasar untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat.
- Mendayagunakan potensi ekonomi dari sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan termasuk pengamanannya untuk meningkatkan ekspor.
- Melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang menghambat investasi, produksi, distribusi dan perdagangan.
- Melakukan penyelamatan sosial melalui program-program khusus bagi mereka yang putus kerja, yang mengalami hambatan usaha dan mencegah laju pengangguran terbuka serta laju kemiskinan.

Sedangkan butir-butir Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang "*Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI*", yang terkait dengan pembangunan pertanian adalah:

- Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional.
- Pengelolaan sumberdaya alam secara efektif dan efisien dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.
- Peningkatan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani/ pengusaha kecil dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan demokratisasi ekonomi.
- Pemberian prioritas dukungan kepada pengusaha ekonomi lemah.
- Tanah sebagai basis pertanian digunakan untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi petani-nelayan kecil.

b. Reorientasi dan Agenda Reformasi

Sejalan dengan perkembangan aspirasi masyarakat, sejak awal 1990-an mulai muncul pemikiran-pemikiran yang progresif untuk melaksanakan reorientasi pendekatan pembangunan pertanian. Beberapa butir reorientasi pendekatan pembangunan yang mulai diterapkan secara gradual dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian sejak Repelita VI, diantaranya adalah :



- Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan dari dominasi perencanaan terpusat menjadi lebih terdesentralisasi, dalam upaya untuk menjamin pembangunan partisipatif, optimasi pemanfaatan sumberdaya yang beragam dan pencapaian pembangunan daerah yang lebih merata.
- Perubahan orientasi pembangunan dari pendekatan produksi menjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- Perubahan penekanan pengembangan produk dari upaya menghasilkan produk pertanian primer kepada produk-produk olahan yang dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan, melalui pengembangan agribisnis di pedesaan.
- Perubahan dari pemanfaatan teknologi pada tenaga kerja mengarah pada penerapan teknologi padat modal dan mekanisasi pertanian dalam upaya untuk mencapai efisiensi usaha dan daya saing komoditas.
- Perubahan dari dominasi peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan mengarah pada peningkatan peran masyarakat dan swasta.

Dengan adanya reformasi pada berbagai bidang yang mendapatkan momentum pada bulan Mei 1998, tentunya reorientasi pendekatan pembangunan pertanian di atas tetap relevan dan dapat senantiasa disempurnakan agar pembangunan pertanian sejilwa dengan semangat reformasi yang kini tengah bergulir secara nasional. Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian, telah dirumuskan delapan agenda reformasi pembangunan pertanian sebagai berikut :

- a. Menciptakan sektor pertanian menjadi sektor andalan dan mesin penggerak ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan koordinasi lintas sektor agar diperoleh dukungan kebijakan ekonomi makro yang kondusif, baik berupa kebijakan fiskal, moneter maupun perdagangan.
- b. Membangun pertanian dengan keberpihakan kepada petani, peternak dan nelayan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian sebagai subyek pembangunan, agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.



- c. Mempertajam implementasi misi pembangunan pertanian pada upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Selama ini sektor pertanian sarat dibebani oleh berbagai misi pencapaian sasaran pembangunan.
- d. Meningkatkan keberdayaan petani dan kelembagaan kelompok tani agar mampu secara efektif mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan petani. Adanya organisasi petani yang kuat merupakan faktor kunci agar kepentingan petani dapat lebih diakomodasikan dalam kebijakan pembangunan. Organisasi tersebut merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis masalah dan menentukan secara rasional kegiatan pembangunan pertanian yang tepat bagi mereka.
- e. Membangun pertanian dan aparat pertanian untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya petani dan nelayan, sehingga dapat menumbuhkan iklim kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian.
- f. Mendukung proses demokratisasi dalam pembangunan pertanian melalui langkah revitalisasi kelembagaan dan aparat pertanian di daerah, percepatan pelaksanaan otonomi di bidang pertanian dengan menerapkan perencanaan wilayah sebagai dasar penentuan kegiatan pembangunan pertanian.
- g. Meningkatkan keterkaitan subsistem produksi pertanian dengan subsistem lainnya (prasarana, pengolahan, pemasaran/distribusi) dalam kerangka pengembangan agribisnis.
- h. Mempertajam orientasi dan arah pengembangan komoditas pertanian dengan mengacu pada dinamika pasar, produk unggulan berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan, dan terintegrasi dengan sektor dan sub-sistem ekonomi lainnya.

5. Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi

Operasionalisasi pelaksanaan pembangunan pertanian yang difokuskan kepada ketiga program tersebut di atas, dalam rangka peningkatan produksi komoditas-komoditas unggulan



diformulasikan dalam bentuk Gerakan Mandiri (Gema). Sementara itu, kegiatan pembangunan pertanian secara umum tetap dilaksanakan sesuai dengan program-program utama dan penunjang pembangunan pertanian. Konsep Gema ini disosialisasikan sebagai ciri ataupun tema dalam memobilisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya pembangunan (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, modal dan kelembagaan). Konsep Gema ini dipakai pula sebagai alat untuk menggaling dukungan dari berbagai pihak terkait dalam bentuk koordinasi di tingkat perencanaan di pusat sampai daerah dan pelaksanaannya di lapangan.

Pada prinsipnya Gema ini merupakan suatu upaya peningkatan kemandirian dan keberdayaan para petani, peternak, dan nelayan dalam menjalankan usaha pertaniannya agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing komoditas, melalui langkah-langkah :

- Menyusun perencanaan sasaran dan langkah kegiatan dengan mempertimbangkan keragaman potensi sumberdaya alam antar wilayah.
- Meningkatkan kesadaran pihak-pihak terkait tentang peran strategis pertanian sebagai sektor penggerak pembangunan melalui peningkatan intensitas dan harmonisasi koordinasi lintas sektor. Hal ini penting, karena perumusan kebijakan yang menyangkut pembangunan pertanian tidak seluruhnya berada di bawah kewenangan Departemen Pertanian.
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan para petani, peternak, dan nelayan untuk menerapkan teknologi rekomendasi melalui penyuluhan yang lebih intensif dan mengupayakan penyediaan kredit usahatani bersubsidi serta memfasilitasi pengadaan sarana produksi di lapangan tepat waktu.
- Menyediakan insentif dan kondisi kondusif bagi petani, peternak dan nelayan agar mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara optimal.

Sejak TA 1998/1999 telah diluncurkan tiga Gema dan satu program peningkatan ekspor perikanan, yaitu:

- 1) Gema Palagung 2001, yaitu Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Padi, Kedelai dan Jagung untuk mencapai swasembada tahun 2001;



- 2) Gema Proteina 2001, yaitu Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Protein Hewani dengan sasaran sampai tahun 2001;
- 3) Gema Hortina 2003, yaitu Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Hortikultura Tropika Nusantara dengan sasaran sampai tahun 2003;
- 4) Protekan 2003 yaitu Program Peningkatan Ekpor Hasil Perikanan dengan sasaran nilai ekspor sebesar US \$ 10 milyar pada tahun 2003.

Berikut adalah uraian ringkas intisari dari konsep berbagai Gema tersebut.

a. Gema Palagung 2001

Gema Palagung 2001 adalah gerakan mandiri menuju swasembada padi, kedelai dan jagung pada tahun 2001. Sasaran Gema Palagung ini didasarkan atas prediksi permintaan atau kebutuhan terhadap ketiga komoditas pangan tersebut yang meliputi konsumsi pangan manusia, benih, pakan, bahan baku industri, serta kehilangan hasil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui swasembada (on trend), dirumuskan sasaran produksi padi sebesar 54,3 juta ton, jagung 12,0 juta ton dan kedelai 2,2 juta ton pada tahun 2001. Untuk itu direncanakan luas panen komoditas tersebut berturut-turut 12,2 juta ha, 4,4 juta ha dan 1,7 juta ha.

Dengan produksi padi sebesar 54,3 juta ton (34,3 juta ton setara beras), Indonesia pada tahun 2001 akan mencapai kembali swasembada beras. Pada tahun tersebut, penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 213,6 juta jiwa dengan perkiraan konsumsi sebesar 134,44 Kg/kapita/tahun, sehingga kebutuhan konsumsi beras nasional mencapai 28,7 juta ton. Kebutuhan lainnya terdiri atas benih, industri, dan penyusutan/kehilangan sebesar 1,7 juta ton dan sisanya berupa stok di Bulog, pedagang dan masyarakat.

Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produktivitas melalui : (a) peningkatan ketersediaan dan pemasyarakatan penggunaan benih unggul, meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu, serta meningkatkan pelayanan pelepasan varietas, perijinan dan



- sertifikasi benih; (b) peningkatan efisiensi penggunaan sarana produksi melalui perbaikan teknologi cara tanam, pemupukan dan penggunaan air; (c) peningkatan kemampuan petani menerapkan teknologi rekomendasi melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan kredit usahatani (KUT), peningkatan kemampuan dan kemandirian petani dalam penyusunan Rencana Definitif Kerja Kelompok (RDKK), pemanfaatan kredit modal kerja dan pengembalian KUT; dan (d) pengamanan penyaluran dan mutu sarana produksi terutama pupuk dan benih melalui kegiatan koordinasi pengadaan, monitoring penyaluran, mutu dan harganya.
- 2) Perluasan areal tanam melalui : peningkatan Indeks Pertanaman (IP), dengan (a) rekayasa teknologi yang antara lain dilakukan melalui pengaturan pola tanam, penerapan alsintan pra dan pasca panen, pengaturan penyediaan air; dan rekayasa sosial/budaya dilakukan antara lain dengan gerakan dan penyuluhan, serta peningkatan ketrampilan petani; (b) perluasan lahan baru, dilakukan pada lahan-lahan yang belum termanfaatkan secara optimal seperti pada lahan di daerah transmigrasi, lahan PIRBUN, area kehutanan, pengembangan pasang surut, dan daerah irigasi baru; (c) pengembangan penerapan alat dan mesin pertanian guna mempercepat pengolahan tanah, pompanisasi dan panen/pasca panen dilaksanakan melalui pola pengembangan kelompok Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).
 - 3) Pengamanan produksi tanaman pangan melalui (a) Gerakan Tanam Serentak dengan pemantapan pola tanam sesuai dengan agroekosistem, dan penyediaan sarana produksi secara 6 tepat; mengembangkan pergiliran tanam dan varietas untuk mengurangi resiko hama dan penyakit tanaman; (c) meningkatkan koordinasi pengaturan tata guna air dengan kegiatan pengembangan pompanisasi dan embung untuk mengamankan daerah-daerah andalan produksi yang rawan kekeringan, melaksanakan Gerakan Hemat Air, melaksanakan revitalisasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), dan mengembangkan tata air mikro dan surjan pada lahan pasang surut; dan (d) Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang dilaksanakan dengan identifikasi dan pemetaan OPT utama, penyediaan alat dan cadangan pestisida pada daerah potensial eksplosif serangan dan daerah sumber serangan, pemasyarakatan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dan pengembangan sistem pengendalian OPT



- secara kelompok dalam setiap hamparan dan mendirikan posko-posko pengendalian.
- 4) Penyelamatan hasil dilakukan melalui Gerakan Penyelamatan Hasil berupa pemasyarakatan dan optimalisasi penggunaan peralatan panen dan pasca panen; pengembangan UPJA; rehabilitasi penggilingan padi; dan pemasyarakatan Lumbung Pangan di Pedesaan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
 - 5) Peningkatan pemasaran hasil dan agribisnis dengan membentuk dan memfungsikan kelembagaan pemasaran; mengamankan harga dasar gabah; memberikan pelayanan informasi pasar berisi informasi produk, pengembangan jaringan informasi pasar, dan pelatihan informasi pasar, dan selain itu, diupayakan pengembangan kemitraan usaha antara pelaku bisnis komoditi padi, kedelai dan jagung (petani, pedagang, dan industri pengolahan).
 - 6) Pengembangan kemampuan petugas dan petani melalui pelatihan untuk petani berupa sekolah lapangan; pelatihan untuk petugas yang terdiri dari PPL, pengawas benih, pengamat hama dan PPS; serta diklat petani yang dilaksanakan selama satu musim tanam melalui beberapa kali pertemuan di lahan usaha tani peserta.
 - 7) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem koordinasi yang dilakukan secara bertahap mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional pelaksanaan, dalam kerangka peningkatan pelayanan sarana produksi, menyediakan skim kredit, ketersediaan air beserta infrastruktur.

b. Gema Hortina 2003

Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara (Gema Hortina) 2003 dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura. Komoditas hortikultura yang dikembangkan adalah sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, mempunyai peluang pasar besar, mempunyai potensi produksi tinggi serta mempunyai peluang pengembangan teknologi. Gerakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran produksi yang dihitung berdasarkan pada kebutuhan konsumsi dan ekspor komoditi hortikultura sebagai berikut :



- Meningkatnya ketersediaan hortikultura yang mengacu pada rekomendasi konsumsi per kapita dari FAO, yaitu sayuran dan buah-buahan masing-masing sebesar 65 kg/ kapita/ tahun.
- Meningkatnya volume dan nilai ekspor hortikultura Indonesia yang ditargetkan mencapai US\$ 600 juta pada tahun 2003.
- Tercapainya ketersediaan hortikultura nasional setara US\$ 10 Milyar.

Adapun komoditas unggulan yang dikembangkan adalah kentang, kubis, cabe merah, bawang merah, tomat, jamur (sayuran); pisang, mangga, jeruk, manggis, dan nenas (buah-buahan); anggrek. (tanaman hias); dan jahe, kunyit (tanaman obat). Kegiatan pokok dilaksanakan melalui pengembangan Sentra Agribisnis Hortikultura yang dalam pelaksanaannya dijabarkan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu Penumbuhan Sentra dan Pemantapan Sentra melalui upaya penumbuhan serta pemantapan sentra, dengan demikian diharapkan produksi hortikultura dapat dikembangkan lebih pesat lagi. Untuk tahun 1999 sasaran produksi hortikultura utama untuk buah-buahan sebesar 7,10 juta ton dan sayuran sebesar 1,07 juta ton.

1) Penumbuhan Sentra

- Sayuran, dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan tidur potensial dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
- Buah-buahan, dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan tidur potensial dan pemanfaatan kebun-kebun terlantar
- Tanaman Hias dan Tanaman Obat, dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan tidur potensial, pengembangan pola perguliran, pengembangan TOGA, tabulapot, dan tabulakar.

2) Pemantapan Sentra Melalui Peningkatan Produktivitas

- Sayuran
 - * Pra Panen, melalui pengembangan varietas unggul bermutu, pengembangan pemupukan berimbang dan irigasi yang efisien, pengembangan manajemen kesehatan tanaman terpadu dan pengembangan manajemen pola tanam.
 - * Pasca Panen, melalui pengembangan standar mutu sayuran dan pengembangan teknologi kemasan



- * Pemasaran, melalui pengembangan informasi pasar, pembangunan terminal dan sub terminal agribisnis, pengembangan UPA (Unit Pengembangan Agribisnis)
 - * Kelembagaan, melalui pengembangan Usaha Jasa Pelayanan Saprotan, pengemasan dan Alsin, pengembangan kelompok usaha dan pengembangan jaringan komoditas.
- Buah-buahan
 - * Pra Panen, melalui pengembangan sistim perbenihan, penerapan teknologi pemupukan dan irigasi, manajemen pembungaan, dan penerapan manajemen kesehatan tanaman terpadu.
 - * Pasca Panen, melalui pengembangan standar mutu buah dan pengembangan teknologi kemasan
 - * Pemasaran, melalui pengembangan informasi pasar, pembangunan terminal dan subterminal agribisnis, serta pengembangan UPA (Unit Pengembangan Agribisnis)
 - * Kelembagaan, melalui pengembangan jaringan informasi komoditas, pengembangan penangkar benih, pengembangan kelompok usaha, pengembangan usaha jasa saprotan, kemasan dan alsintan
 - Tanaman Hias dan Tanaman Obat
 - * Pra Panen, melalui penerapan teknologi pemupukan dan irigasi, pengembangan media tanam, penerapan manajemen kesehatan tanaman terpadu,
 - * Pasca Panen, melalui pengembangan teknologi perpanjangan daya tahan bunga, dan pengembangan teknologi kemasan
 - * Pemasaran, melalui pengembangan informasi pasar, pembangunan terminal dan sub terminal agribisnis
 - * Kelembagaan, melalui pengembangan usaha jasa pelayanan saprotan, pengemasan dan alsin, pengembangan kelompok usaha

c. Gema Proteina 2001

Gerakan Mandiri Protein Hewani tahun 2001 (Gema Proteina 2001) dilaksanakan untuk: (a) meningkatkan pendapatan petani hingga di atas upah minimum regional (UMR); (b) menghasilkan



tambahan produksi daging dan telur sebagai sumber protein hewani untuk menunjang ketahanan pangan nasional, dan (c) meningkatkan ekspor atau substitusi impor dalam rangka perolehan atau penghematan devisa negara. Sasaran tersebut akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran tambahan populasi dan produksi beberapa komoditas peternakan yang secara intensif diupayakan dalam Gema Proteina ini pada tahun 2000/2001 sebagai berikut.

- Ayam buras, populasi 4,2 juta ekor dengan produksi daging 18,5 ribu ton dan produksi telur 221 juta butir pertahun;
- Itik, populasi 460 ribu ekor dengan produksi daging 1,9 ribu ton dan telur 46,9 juta butir pertahun;
- Kambing, populasi 17,3 ribu ekor dengan produksi daging antara 211,7 hingga 282,2 ton pertahun;
- Domba, populasi antara 12,9 hingga 16,5 ribu ekor dengan produksi daging antara 112,7 dan 141,1 ton pertahun.

Secara keseluruhan sasaran produksi daging, telur dan susu tahun 1999 masing-masing adalah 1,183,500 ton, 615,500 ton dan 437,500 ton.

Langkah dan kegiatan pokok Gema Proteina 2001, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan efisiensi melalui peningkatan skala ekonomi usaha yang akan dicapai dengan pengembangan usaha peternakan dalam kawasan, yang dilengkapi dengan unit pengembangan perbibitan, unit pengembangan/pembesaran ternak, unit produksi pakan dan unit pelayanan kesehatan ternak.
- 2) Peningkatan produktivitas usaha peternakan melalui intensifikasi peternakan dengan penerapan sapta usaha peternakan, dan meningkatkan keterkaitan antar subsistem agribisnis.
- 3) Peningkatan mutu dan daya saing produk peternakan melalui penerapan manajemen mutu terpadu.
- 4) Pemberdayaan petani melalui pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan pelayanan serta perubahan pendekatan pembangunan ke arah desentralisasi, debirokratisasi, privatisasi dan kemitraan.



d. Protekan 2003

Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan (Protekan) 2003 adalah upaya peningkatan ekspor komoditas perikanan. Sasaran ekspor tahun 2003 sebesar US \$ 10,19 milyar yang terdiri dari: US \$ 2,9 milyar berasal dari ekspor komoditas hasil penangkapan (tuna, cakalang, ikan-ikan pelagis dan demersal), US \$ 6,79 milyar berasal dari ekspor udang hasil budidaya tambak, US \$ 0,42 milyar berasal dari budidaya laut (rumput laut, kakap putih, kerapu, dan mutiara) dan US \$ 0,05 milyar dari budidaya air tawar (nila, kodok lembu dan labi-labi). Sasaran ekspor tersebut diharapkan dicapai melalui peningkatan produksi perikanan pada tahun 2003 secara keseluruhan sebesar 9,96 juta ton, yang berasal dari usaha penangkapan di laut sebesar 4,96 juta ton, budidaya air payau sebesar 0,97 juta ton, budidaya laut sebesar 2,96 juta ton, budidaya air tawar sebesar 0,60 juta ton, dan perairan umum sebesar 0,47 juta ton.

Untuk mencapai sasaran ekspor tersebut langkah-langkah pokok yang dilaksanakan melalui Protekan 2003 adalah:

- 1) Pengembangan penangkapan perikanan laut dalam (deep sea fisheries) untuk ikan pelagis besar di perairan Laut Banda, Laut Seram-Tomini, Selat Makasar-Flores dan Laut Sulawesi serta Samudera Pasifik yang diarahkan untuk:
 - Peningkatan produksi ikan tuna melalui peningkatan produktivitas alat tangkap dengan alat bantu penangkapan atau rumpon dan penambahan unit penangkapan hand line berukuran 3-5 GT dan long line berukuran (50-100 GT).
 - Peningkatan produksi ikan cakalang dilakukan dengan pengembangan armada pole and line berukuran < 30 GT dan purse seine berukuran 100-400 GT.
 - Penangkapan ikan pelagis kecil dilaksanakan dengan pengembangan armada purse seine berukuran < 30 GT untuk Laut Banda dan Laut Seram-Tomini; dan purse seiner berukuran 30-100 GT dan 100-400 GT di Samudera Hindia, Paparan Sunda, Laut China Selatan, Selat Makasar-Flores, Laut Arafura dan Laut Sulawesi-Pasifik.
 - Pengembangan produksi ikan demersal dengan menggunakan armada rawai dasar (bottom long line) berukuran 10-15 GT dan armada jaring berkantong 10-30 GT yang hanya dilakukan di Laut China Selatan dan Laut Jawa.



- 2) Pengembangan usaha budidaya perikanan dilakukan melalui budidaya tambak, budidaya laut, dan budidaya air tawar yang secara keseluruhan diharapkan dapat menyumbang devisa negara sebesar US\$ 7,25 milyar pada tahun 2003. Penerimaan devisa tersebut berasal dari budidaya tambak US\$ 6,79 milyar; budidaya laut US\$ 0,42 milyar; dan budidaya air tawar US\$ 0,05 milyar.

Sebagai komplemen terhadap protekan, dilakukan pula upaya peningkatan produksi perikanan melalui berbagai program pembangunan pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan pasokan konsumsi dalam negeri. Untuk tahun 1999, sasaran produksi hasil perikanan adalah sebesar 5,72 juta ton yang, diperkirakan pasokan untuk konsumsi domestik sebesar 3,98 juta ton, yang berarti ketersediaan untuk konsumsi per kapita sebesar 19,21 Kg/tahun. Sementara itu, untuk ekspor sebesar 818.000 ton dengan nilai ekspor sebesar US \$ 2,48 juta.

6. Program Pembangunan Pertanian

Selama Pelita VI, yaitu T.A.1994/95 sampai dengan 1998/99, dilanjutkan dengan dua tahun masa transisi TA. 1999/2000 dan T.A. 2000/2001, APBN sektor pertanian dilaksanakan melalui empat Program Utama dan tujuh Program Penunjang Pembangunan Pertanian. Keempat program utama tersebut adalah:

- 1) Program Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT)

Program P2RT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memantapkan swasembada pangan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas pertanian rakyat, dengan mengembangkan sentra komoditas unggulan sesuai dengan agroekosistem.

- 2) Program Pembangunan Usaha Pertanian (PUP)

Program PUP ditujukan untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan guna memperoleh nilai tambah yang tinggi, dengan dukungan modal, teknologi, manajemen dan akses pasar.



3) Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG)

Program DPG dimaksudkan untuk meningkatkan penganekaragaman pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu, meningkatkan mutu pangan dan gizi masyarakat berdasarkan pola konsumsi daerah setempat, dan meningkatkan ketersediaan pangan yang bermutu dan bergizi di tingkat rumah tangga.

4) Program Pengembangan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Pertanian (PSSP);

Program PSSP ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian khususnya aparat, meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana, mengembangkan teknologi pertanian dan mengembangkan kelembagaan penunjang pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan.

Keempat program tersebut didesain untuk saling mengisi dalam mengembangkan suatu kawasan. P2RT meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha tani, PUP menangani aspek pasca panen dan pemasaran, DPG meningkatkan kemampuan produksi pangan tingkat keluarga, dan PSSP mengembangkan produktivitas sumberdaya pertanian serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kawasan yang bersangkutan. Peran masing-masing program dan intensitas kegiatannya dalam kawasan tersebut diharapkan beragam sesuai tingkat kemampuan, kemajuan, serta kebutuhannya.

Ketujuh program penunjang pembangunan pertanian adalah: (1) Program Pembinaan Daerah Pantai; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (3) Pendidikan Kedinasan; (4) Penguasaan Teknologi; (5) Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan; (6) Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik; dan (7) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara.



III. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PERTANIAN

1. Pembinaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pembinaan Hukum

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana kelembagaan lingkup Departemen Pertanian telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

a. Penataan Organisasi

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998, Departemen Pertanian telah melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1016/Kpts/OT.210/12/98 tanggal 28 Desember 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Pertanian tersebut maka unit kerja Pusat-Pusat yang terdiri dari Pusat Karantina Pertanian, Pusat Data Pertanian, dan Pusat Penyuluhan Pertanian yang berada langsung di bawah kendali Menteri Pertanian; dimasukkan kepada struktur unit kerja utama yang lebih sesuai. Sehubungan dengan itu, Pusat Karantina Pertanian menjadi bagian dari unit kerja Eselon I Badan Agribisnis, Pusat Data Pertanian dibawah kendali Sekretariat Jenderal dan Pusat Penyuluhan Pertanian dimasukkan kedalam lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

Dengan adanya perubahan di atas, maka susunan organisasi unit kerja Eselon I Sekretariat Jenderal, Badan Agribisnis dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian mengalami penyempurnaan unit kerja tingkat Eselon II, sebagai berikut :

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- Biro Perencanaan
- Biro Kepegawaian
- Biro Keuangan
- Biro Hukum
- Biro Organisasi dan Tata Laksana
- Biro Hubungan Masyarakat



- Biro Kerjasama Luar Negeri
- Biro Tata Usaha dan Perlengkapan
- Pusat Data Pertanian

Badan Agribisnis terdiri dari :

- Sekretariat Badan
- Pusat Standarisasi dan Akreditasi
- Pusat Pengembangan dan Informasi Pasar
- Pusat Pengembangan Usaha dan Hubungan Kelembagaan
- Pusat Pengembangan Investasi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Pusat Karantina Pertanian

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian terdiri dari :

- Sekretariat Badan
- Pusat Pengkajian Sumberdaya Manusia Pertanian
- Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- Pusat Pendidikan Pertanian
- Pusat Pembinaan Penyuluhan Pertanian.

Disamping itu sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal (BP. Bimas) telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Setdal Bimas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.37/Kpts/OT.210/2/98. Sementara itu, untuk memantapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satuan Pembina Bimas Propinsi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 378/Kpts/OT.2 10/3/1999 tanggal 26 Maret 1999. Berdasarkan keputusan tersebut SP. Bimas Propinsi dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yakni tipe A dan tipe B. Tipe A ditingkatkan dari Eselon III A menjadi Eselon II B sebanyak 10 (sepuluh) propinsi yaitu D.I. Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTB serta Sulsel dan sisanya 17 (tujuh belas) propinsi tipe B tetap Eselon III A. Penetapan tipe tersebut dihitung berdasarkan skoring yang dilihat dan berbagai faktor.

Dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan pengkajian organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian oleh



Tim Pengkajian Organisasi Departemen Pertanian yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/Kp. 150/2/1999 tanggal 22 Pebruari 1999. Tim bertugas melakukan pengkajian kelembagaan birokrasi pertanian dalam rangka pelaksanaan organisasi Departemen Pertanian Tahun 2000.

Untuk meningkatkan Kinerja UPT Departemen Pertanian telah dilakukan penataan tugas dan fungsi UPT oleh suatu Tim Pengkajian Unit Swadana/Privatisasi Unit Pelaksana Teknis Departemen Pertanian. Tim dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 427/Kpts/Kp. 150/4/1999 tanggal 26 April 1999. Tim ini bertugas melakukan pengkajian dan menyusun rencana privatisasi/swadana UPT lingkup Departemen Pertanian untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan guna memperoleh persetujuan. Secara umum rencana privatisasi UPT dikelompokkan menjadi UPT Departemen Pertanian Mumi, UPT Daerah dan UPT yang diprivatisasi (swasta murni dan swadana)

Guna menunjang kegiatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pertanian agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang:

- 1) Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan, Nomor 403/Kpts/Ot.210/4/1998 Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Gema Palagung 2001, 706/Kpts/Ot.210/9/1998.
- 2) Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pembina Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional, Nomor 796/Kpts/OT.2 10/9/1998.
- 3) Organisasi dan Tata Kerja Proyek/Bagian Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat/Petani (PKPN-MPMP), Nomor 891/Kpts/OT.210/1 1/1998.
- 4) Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani dan Ternak di Kawasan Timur Indonesia (PUTKATI), dengan Nomor 425/Kpts/OT.2 10/4/1999.
- 5) Pembentukan Tim Assistensi Pembinaan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, Nomor 424/Kpts/KP.150/4/1999.

b. Penyempurnaan Ketatalaksanaan

Untuk menindak lanjuti Keputusan Menteri Pertanian No. 706/Kpts/Ot.210/8/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Gema Palagung 2001 dan agar pengendalian pelaksanaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Gema Palagung 2001 dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/TU.150/3/99.

Sebagai penjabaran Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sedang dilakukan pemetaan kewenangan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten di sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan sebagai bahan pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Urusan di bidang Pertanian kepada daerah.

Dalam hal anggaran pembangunan, penyusunan dan pembahasannya telah didaerahkan mulai pada Tahun Anggaran 1998/1999, dan untuk anggaran rutin akan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 1999/2000.

c. Pembinaan Hukum

Dalam kurun waktu 1998-1999 berbagai kebijakan dalam upaya pembinaan hukum di bidang pertanian dengan dijiwai oleh semangat reformasi telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Tentu saja penyempurnaan tersebut mengacu pada ke-empat Undang-Undang yang mengatur sektor pertanian yaitu :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.



(1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Keputusan Menteri Pertanian No: 756/Kpts.TN.510/9/1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 757/Kpts/TN.510/9/1998 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi di Pulau Timor.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 828/Kpts/OT.210/V/1998 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan kluron Menular (Brucellosis) pada Ternak.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 466/Kpts/TN.260/10/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang baik.

(2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

- Keputusan Menteri Pertanian No: 391/Kpts/PL.810/4/1999 tentang Pengadaan Kapal Perikanan dan Penghapusan Sistem Sewa Kapal Perikanan Berbendera Asing.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 392/Kpts/IK.12/4/1999 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan;
- Keputusan Menteri Pertanian No: 428/Kpts/IK.120/4/ 1999 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 448/Kpts/KU.440/5/1999 Tentang Ketentuan Tarif Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perum Prasarana Perikanan Samudra.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 810/Kpts/IK.210/7/1999 tentang Pengujian, Penilaian, Dan Pelepasan Jenis Dan Atau Varietas Ikan.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 811/Kpts/IK.450/7/1999 tentang Penunjukkan Balai Dan Loka Budidaya Sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Dan Laboratorium Penguji.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 812/Kpts/IK.110/7/1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Pelepas Jenis Dan Atau Varietas Ikan.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 843/Kpts/IK.120/7/1999 Tentang Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Induk Ikan Untuk Keperluan Penelitian Bukan Untuk Tujuan Komersial.



(3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

- Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan PKM Nomor: 525/Kpts/TP.240/5/1998 tentang Memberdayakan Koperasi dan Pengusaha Kecil.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 597/KPtS/BM.530/7/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Hortikultura.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas.
- Keputusan Menteri Pertanian No: 859/Kpts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras;
- Keputusan Menteri Pertanian No: 949/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Pedoman Pestisida Terbatas;
- Keputusan Menteri Pertanian No: 1017/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina;
- Keputusan Menteri Pertanian No. 1080/Kpts/TP.270/10/99 yang menunda berlakunya Keputusan Menteri Pertanian No: 527/Kpts/TP.270/5/1999 tentang Pengaturan Kembali Pendaftaran dan Izin Pestisida.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 1079/Kpts/TP.270/10/99 yang menunda berlakunya Keputusan Menteri Pertanian No: 528/Kpts/TP.270/5/1999 tentang Persyaratan Pendaftaran Pestisida.

(4) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah yang masih dalam proses penyelesaian diantaranya adalah:

- RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- RUU Tentang Kehewan yang merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- RPP Tentang Usaha Budidaya Tanaman
- RPP Tentang Pengawasan, Pengadaan dan Peredaran Pupuk Budidaya Tanaman
- RPP Tentang Alat dan Mesin Pertanian



- RPP Tentang Prasarana Perikanan
- RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- RPP Tentang Usaha Perikanan
- RPP tentang Karantina Hewan
- RPP tentang Karantina Ikan
- RPP tentang Karantina Tumbuhan.
- RPP sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Rancangan Kepres Tentang Pembinaan Peternakan Ayam Ras.

2. Pembinaan Pegawai

a. Aparat Departemen Pertanian

Seluruh aparat Departemen Pertanian sampai Agustus 1999 berjumlah 80.661 pegawai, yang dikelompokkan menjadi pegawai pusat, pegawai yang diperkerjakan pada daerah dan instansi lain, serta pegawai yang diperbantukan pada daerah dan instansi lain. Jumlah pegawai ini terdiri dari 49.620 pegawai pusat dan diperkerjakan (DPK) dan 31.041 pegawai diperbantukan (DPB).

Penyebaran pegawai Departemen Pertanian berdasarkan Unit Kerja Eselon I pada Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

(1). Sekretarian Jenderal	13.435
(2). Inspektorat Jenderal	282
(3). Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.273
(4). Ditjen Peternakan	6.091
(5). Ditjen Perikanan	4.858
(6). Badan Litbang Pertanian	8.009
(7). Badan Diklat Pertanian	5.235
(8). Badan Pengendali Bimas	3.154
(9). Badan Agribisnis	283

Menurut golongan, jumlah pegawai terdiri dari: golongan I adalah 2.892 pegawai, golongan II adalah 22.959 pegawai, golongan III 21.582 pegawai dan golongan IV 2.187 pegawai.



Formasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian Tahun Anggaran 1998/1999 adalah 2.997 pegawai, yang berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari S1 sebesar 1.261; SM/D3 sebesar 238; SLTA sebesar 1.218; SLTP sebesar 111; dan SD sebesar 169. Di samping itu terdapat pengangkatan sebanyak 5 pegawai untuk Otorita Batam. Semua formasi tersebut sampai dengan bulan Juli 1999 telah selesai diproses sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan krisis yang terjadi di Timor-Timur, pegawai negeri sipil Timor-Timur mendapat penanganan khusus. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Timor-Timur sejumlah 1.332 orang dengan rincian 711 orang Pegawai Negeri Sipil adalah putra daerah, sedangkan sisanya sebesar 621 orang Pegawai Negeri Sipil adalah pendatang. Dengan adanya perubahan situasi telah diambil kebijakan untuk merelokasi Pegawai Negeri Sipil Timor-Timur ke Propinsi lainnya. Untuk itu telah diterbitkan Surat Keputusan Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Timor-Timur ke Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi lainnya di seluruh Indonesia. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari putra daerah, untuk sementara dievakuasi ke Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang pendatang dimutasi/alih tugaskan ke 17 propinsi dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| (1). Setjen/Kanwil | : 62 orang |
| (2). Ditjen Tanaman Pangan dan Horti | : 80 orang |
| (3). Ditjen Peternakan | : 45 orang |
| (4). Ditjen Perikanan | : 34 orang |
| (5). Badan Litbang Pertanian | : 40 orang |
| (6). Badan Diklat Pertanian | : 19 orang |
| (7). Setdal Bimas | : 42 orang |
| (8). Puskar | : 16 orang |
| (9). Penyuluh | : 285 orang |

b. Penyuluh

Dengan ditetapkannya BIPP sebagai kelembagaan pelaksana penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota, sampai dengan triwulan I tahun 1999/2000 telah terbentuk 299 BIPP (97 %) dari seluruh Kabupaten/Kota dan 3.560 BPP dikecamatan dari seluruh Kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam rangka



mendukung pengembangan usahatani yang berwawasan agribisnis, dalam tahun 1997/1998 juga telah dikembangkan lima BIPP Model sebagai pusat informasi dan promosi agribisnis. Pada BIPP Model tersebut disediakan ruang pameran/promosi dan penyuluh/konsultan agribisnis, serta dilengkapi berbagai informasi seperti data potensi wilayah, teknologi, pasar dan lain-lainnya dengan menggunakan sarana modern seperti komputer dan jaringan internet.

Perkembangan jumlah tenaga Penyuluh Pertanian belakangan ini relatif tetap, perubahan terutama hanya berupa peralihan status dari tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil dan perpindahan dari atau ke jabatan struktural. Secara khusus pelatihan penyuluh pertanian juga dilaksanakan dalam mensukseskan program-program Gerakan Mandiri untuk peningkatan produksi pangan.

Sampai dengan triwulan I tahun 1999/2000 terdapat 37.333 orang Penyuluh Pertanian di seluruh Indonesia, yang sebagian besar berada di lapangan, yaitu di Kecamatan (BPP) 30.586 orang (81,9%), dan di Kabupaten 5.994 orang (16,1%), sedangkan di Propinsi hanya ada 703 orang (1,9%) dan di Pusat 50 orang (0,1%). Sementara itu, kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapangan telah dapat meningkatkan jumlah dan kemampuan serta peranan kelompok tani-nelayan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, dan telah turut berperan dalam mendorong keberhasilan program-program peningkatan produksi pangan yang dilaksanakan dalam menghadapi krisis ekonomi sejak tahun 1998/1999.

Sampai dengan triwulan I tahun 1999/2000 tercatat 357.618 kelompok tani-nelayan di seluruh Indonesia, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlahnya terus meningkat, di samping kemampuannya yang juga terus

3. Perkembangan Aset

Berdasarkan inventarisasi asset barang milik/kekayaan negara yang dikelola Departemen Pertanian sampai dengan 1 April 1999 bernilai sebesar kurang lebih Rp. 1.364.244.030.560,- dengan rincian sebagai berikut :



• Sekretariat Jenderal	Rp. 115.242.866.750,-
• Inspektorat Jenderal	Rp. 835.483.580,-
• Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp. 188.666.566.070,-
• Dirjen Peternakan	Rp. 339.639.352.010,-
• Dirjen Perikanan	Rp. 426.555.384.400,-
• Badan Agribisnis	Rp. 2.756.867.420,-
• Badan Litbang Pertanian	Rp. 197.725.012.430,-
• Badan Diklat Pertanian	Rp. 76.059.882.900,-
• Sekretaris Pengendali Bimas	Rp. 16.762.615.000,-

Sehubungan pelaksanaan program UPSUS, telah dilakukan pengadaan asset negara yang berupa pembangunan gedung, alat dan mesin pertanian, alat kantor, hewan, ikan, tanaman, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Inventarisasi terhadap asset kegiatan UPSUS tersebut sampai dengan 1 April 1999 sebesar Rp. 38.249.648.700,- dengan rincian sebagai berikut:

• Sekretariat Jenderal	Rp. 355.060.000,-
• Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp. 16.000.995.000,-
• Dirjen Peternakan	Rp. 7.184.935.000,-
• Dirjen Perikanan	Rp. 4.706.357.550,-
• Badan Agribisnis	Rp. 1.984.469.000,-
• Badan Litbang Pertanian	Rp. 7.951.302.150,-
• Sekretaris Pengendali Bimas	Rp. 66.530.000,-

4. Pengelolaan Anggaran

a. Anggaran Belanja Rutin

Anggaran Rutin Departemen Pertanian dalam TA 1998/1999 dan TA 1999/2000 masing-masing sebesar Rp. 404,42 milyar dan Rp. 524,78 milyar. Untuk TA 1999/2000, anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai, Barang, Pemeliharaan dan Perjalanan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 350 Satuan Kerja di seluruh Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kecenderungan besarnya Anggaran Belanja Rutin selama dua tahun terakhir menunjukkan kenaikan, namun kenaikan ini belum memadai untuk membiayai tugas pokok dan fungsi



masing-masing satuan kerja. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar anggaran belanja rutin dialokasikan untuk belanja pegawai (80%), sehingga masalah yang timbul setiap tahun antara lain: terjadi tunggakan langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas dan air), terbatasnya keperluan sehari-hari perkantoran, tertundanya pemeliharaan/ perawatan gedung, inventaris kantor, peralatan laboratorium dan lapangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja lingkup Departemen Pertanian senantiasa dihadapkan pada peningkatan volume pekerjaan sebagai akibat hasil pembangunan yang telah diserahkan ke rutin, namun peningkatan ini tidak diikuti dengan peningkatan anggaran rutin yang memadai. Hal ini menunjukkan belum sinkronnya antara anggaran rutin dan pembangunan. Keadaan ini diperparah oleh krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak Juli 1997 dimana harga dan biaya langganan daya dan jasa meningkat tajam.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Departemen Pertanian pada TA 1998/1999 sebesar Rp. 35,11 milyar yang bersumber dari pendapatan pendidikan, penjualan sewa dan jasa, dan pendapatan lain-lain yang dialokasikan kepada 10 (sepuluh) Eselon I di 27 propinsi. Untuk TA 1999/2000 target PNBP tersebut sebesar Rp. 36,55 milyar.

c. Anggaran Pembangunan

Tahun anggaran 1998/1999 pembangunan pertanian dilaksanakan melalui 4 Program Utama dan 7 Program Penunjang dengan anggaran sebesar Rp. 567,6 milyar untuk program reguler yang tersebar di 189 buah Proyek dan 1.021 Bagian Proyek. Dampak krisis moneter yang dialami mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan anggaran, menyebabkan anggaran proyek direvisi menjadi Rp. 432,8 milyar.

Pelaksanaan pembangunan pertanian TA 1998/1999 selain dibiayai melalui DIP reguler pada awal Oktober 1998 mendapat anggaran tambahan melalui Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat/Petani pada Program Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu dengan jumlah anggaran Rp. 629,6 milyar.



Pada TA 1999/2000 total anggaran yang dikelola Departemen Pertanian sebesar Rp. 1.254,20 milyar, terdiri dari Rp. 524,76 milyar rupiah murni dan Rp. 729,44 milyar pinjaman luar negeri. Anggaran tersebut dialokasikan pemanfaatannya menurut program, unit kerja utama, dan Pusat-Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura mengelola dana dengan porsi terbesar, diikuti oleh Ditjen Perikanan dan Badan Litbang (Tabel 3.1). Sementara itu, bagian terbesar dari dana APBN ini dialokasikan pada empat program utama (Tabel 3.2).

Sesuai dengan upaya untuk memberikan peran yang lebih besar pada daerah dalam pengelolaan pembangunan, sejak TA 1999/2000 sebagian dana APBN sektor pertanian telah diserahkan perencanaan pemanfaatannya pada daerah/propinsi. Jumlah dana pembangunan yang perencanaan dan pembahasannya dilaksanakan di daerah sebesar Rp. 655,03 milyar (52,2%), yang terdiri dari rupiah murni Rp. 309,90 milyar (59,1%) dan pinjaman luar negeri Rp. 345,13 milyar (47,3%) (Tabel 3.1). Walaupun demikian, dana pembangunan sektor pertanian yang pemanfaatannya di daerah telah melebihi 80 persen.

Pada TA 1998/1999 per 20 Oktober 1998 telah disepakati pinjaman dari OECF, berupa SPL-OECF INP 22 sebesar Rp. 1,6 trilyun untuk pembangunan tanaman pangan dan Rp. 250 milyar untuk pembangunan perikanan. Pada intinya dana pinjaman ini diperuntukkan bagi upaya peningkatan produksi pangan, penyediaan kesempatan kerja, dan penanganan penduduk miskin dalam jangka pendek akibat krisis ekonomi. Proyek ini berlaku selama 2 tahun, sampai Oktober 2000. Rincian kegiatan dari kedua proyek (setelah dibahas dengan Bappenas dan Ditjen Anggaran) adalah untuk Ditjen TPH sebesar Rp. 1.400,98 milyar dan Ditjen Perikanan Rp. 235,26 milyar.

Sampai bulan Agustus 1999, anggaran proyek-proyek bantuan luar negeri (loan) yang dikelola oleh Departemen Pertanian sebesar \$ 481,237.67 ribu. Realisasi kumulatif sampai dengan Mei 1999 sebesar \$ 99,020.69 ribu, sedangkan realisasi disbursement (pemanfaatan) sampai Tahun Anggaran yang lalu sebesar \$ 94,197.61 ribu.



IV. KERAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Produksi Komoditi Pangan Utama

Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan dalam rangka menunjang upaya pemulihan ekonomi, sesuai amanat rakyat yang dirumuskan dalam TAP MPR-RI No. X/MPR/1998, serta diimplementasikan melalui Gema Palagung dan Gema Hortina 2003. Gema Palagung diarahkan terutama untuk memacu laju peningkatan produksi padi, kedelai, dan jagung, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Melalui pelaksanaan Gema Palagung, peningkatan produksi menampakkan hasil yang memuaskan. Produksi padi tahun 1998 mencapai 49,2 juta ton GKG (Gabah kering Giling), yang berarti lebih tinggi sekitar 2,9 juta ton dibandingkan dengan angka Ramalan II BPS sebelum Gema Palagung diluncurkan. Keberhasilan ini diperoleh dari kenaikan luas panen sekitar 590.000 ha dibandingkan dengan luas panen tahun 1997. Dengan luas demikian seharusnya produksi dapat melebihi volume tahun 1997 yang mencapai 49,4 juta ton. Akan tetapi produksi tahun 1998 terlihat menurun sekitar 140,4 ribu ton atau 0,28 persen karena penurunan produktivitas padi dari 44,32 ku/ha menjadi 41,97 ku/ha. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang mengurangi kemampuan petani menerapkan teknologi secara tepat dan menghilangnya pupuk dari pasaran untuk sementara karena adanya gejolak kurs rupiah yang cukup tinggi.

Indikasi lain keberhasilan upaya peningkatan produksi beras tahun 1998/1999 adalah besarnya volume pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog. Selama periode Januari-Juli 1999 pengadaan beras oleh Bulog telah mencapai 1.996.113 ton setara beras; jauh lebih tinggi daripada pengadaan beras tahun 1998 pada periode yang sama, yang hanya 135.616 ton.

Menurut Angka Ramalan II, BPS pada tahun 1999 produksi padi meningkat 0,60 persen dibandingkan dengan tahun 1998.



Diperkirakan akan terjadi kenaikan produktivitas sebesar 0,65 ku/ha meskipun diikuti dengan menurunnya luas panen sebesar 1,9 persen atau sekitar 100 ribu Ha. Seperti halnya tahun sebelumnya, ramalan II BPS untuk tahun 1999 ini jauh lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 52,0 juta ton GKG. Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen pertanian melalui pelaksanaan Gema Palagung, akan berupaya keras agar sasaran produksi tersebut dapat dicapai.

Produksi jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar pada tahun 1998 meningkat masing-masing sebesar 15,95 persen, 0,58 persen, 16,96 persen dan 4,74 persen. Produksi jagung tahun 1998 ini merupakan yang tertinggi dicapai selama ini, diantaranya karena perbaikan teknologi usahatani, termasuk pemanfaatan benih jagung varietas unggul, baik komposit maupun hibrida. Peningkatan produksi berbagai komoditas tersebut diperoleh melalui pertambahan luas panen dan produktivitas.

Produksi kedelai tahun 1998 menurun 3,8 persen dibandingkan dengan tahun 1997. Demikian pula pada tahun 1999, menurut Angka Ramalan II BPS diperkirakan menurun 2,34 persen dibandingkan dengan tahun 1998. Hal ini karena adanya penurunan luas panen dan produktivitas, akibat iklim yang terlalu basah, sehingga kurang sesuai untuk budidaya kedelai. Rincian produksi, luas panen dan produktivitas tanaman pangan disajikan dalam Tabel 4.1.

Pelaksanaan Gema Palagung 2001 dimulai sejak MK II 1998 dengan mendapat dukungan Proyek PKPN-MPMP (Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Perbedayaan Masyarakat/Petani) TA 1998/1999, dilaksanakan di 26 propinsi dan 195 kabupaten. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan pokok yang terdiri dari Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), dan kegiatan penunjang berupa pendampingan dan pengembangan rancang bangun model agribisnis.

Realisasi tanam perluasan areal tanam (PAT) hingga Juni 1999 untuk padi mencapai 521.091 ha atau 68,1 persen dari target 766.000 ha, jagung mencapai 247.115 ha atau 70,6 persen dari target 350.000 ha, dan kedelai 186.471 ha atau 48,6 persen



dari target 384.000 ha. Dari realisasi perluasan areal tanam tersebut diperkirakan diperoleh tambahan produksi masing-masing padi sebesar 2,12 juta ton GKG (113,4% dari sasaran), jagung 0,71 juta ton pipilan kering (67,5% dari sasaran) dan kedelai 0,21 juta ton biji kering (55,5%).

Selain itu, kegiatan pokok pengembangan dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan tanaman pangan dan hortikultura antara lain :

- Pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan Tengah dengan penanaman padi setiap musim berkisar 16.000 ha dengan tingkat produktivitas antara 2,5-3 ton GKP per ha. Selain dimanfaatkan untuk padi, juga dikembangkan komoditas palawija dan hortikultura. Disamping itu, juga telah dilakukan pilot proyek percontohan budidaya dan model usahatani untuk mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani.
- Pembinaan gerakan hemat air melalui pembinaan terhadap kelembagaan tani pemakai air/P3A.
- Perbaikan jaringan irigasi tingkat usahatani berupa; pengembangan pompanisasi 1.639 unit, pengembangan embung tujuh unit, perbaikan jaringan irigasi tingkat usahatani 15.500 unit, dan perbaikan tata air mikro untuk pengembangan padi melalui peningkatan IP 100-200 di lahan pasang surut seluas 146.000 ha.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perluasan areal tanam (PAT) Gema Palagung 2001 antara lain : (1) pengadaan benih padi, kedelai dan jagung belum bisa memenuhi enam tepat, (2) di beberapa daerah curah hujan tinggi dan sebagian terjadi bencana banjir, (3) di beberapa daerah terjadi pergeseran pola tanam sebagai akibat dari musim hujan yang panjang, (4) di beberapa daerah ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan prinsip enam tepat.

Dalam rangka mendukung Gema Palagung 2001, sejak akhir TA. 1998/1999 sampai TA. 2000/2001 dilaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman Sector Program Loan-OECF. Melalui SPL-OECF ini sedang dilaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian peningkatan produksi tanaman pangan secara



nasional. Program ini dilaksanakan di 25 propinsi yang mencakup 194 kabupaten, sasaran penambahan areal tanam seluas 927.758 ha pada tiga tipologi lahan, yaitu lahan irigasi, rawa dan tadah hujan. Dari target tambahan luas tanam tersebut, diharapkan akan menghasilkan tambahan produksi pada tahun 2001 masing-masing untuk padi mencapai 2,1 juta ton GKG, jagung 300.000 ton pipilan kering, dan kedelai 400.000 ton biji kering.

Komponen kegiatan dari SPL-OECF untuk subsektor tanaman pangan tersebut secara umum dibagi ke dalam kelompok kegiatan, yaitu:

- (1). Perbaikan prasarana pertanian; seperti saluran drainase, fasilitas penyediaan air, embung dan jalan usahatani guna mendukung upaya peningkatan produksi dan distribusi/pemasarannya pada lokasi sasaran.
- (2). Pengembangan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen melalui penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Untuk itu dilaksanakan pengadaan alsintan (traktor tangan, pompa air, mesin perontok) sekitar 22.370 alat. Pengadaan di setiap UPJA disesuaikan dengan kondisi agroekosistem dan kebutuhan para petani setempat.
- (3). Pemasyarakatan teknologi percepatan pengolahan lahan dan perbaikan kualitas hasil padi.
- (4). Pemantapan kelembagaan pedesaan dan penyuluhan. Upaya ini didukung dengan kegiatan pendampingan oleh sarjana baru dan anggota LSM sebanyak 5.000 orang di 12 propinsi penghasil utama padi guna mendukung kelancaran penarika, pemanfaatan, dan pengembalian KUT; dan pembinaan kelembagaan pertanian/pedesaan seperti kontak tani dan koperasi tani.
- (5). Revitalisasi kegiatan penyuluhan. Upaya ini didukung dengan pengadaan sepeda motor sebanyak 16.000 buah, yang sebagian besar ditujukan bagi para penyuluh yang benar-benar berada di lapangan.
- (6). Penyediaan jasa konsultan guna membantu mengelola dan memonitor pelaksanaan SPL-OECF ini di lapangan agar mencapai sasaran secara efisien (MMC = *management and monitoring consultant*) dan memperbaiki sistem informasi manajemen data statistik lahan (LUDM = *land use data management*).



b. Pengembangan Hortikultura

Dalam rangka menunjang pengembangan hortikultura, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam TA 1998/1999 antara lain meliputi:

- Pengembangan usaha hortikultura dalam bentuk pengembangan sentra-sentra produksi buah-buahan. Melalui dana pinjaman dari OECF pada TA 1998/1999 telah direalisasikan pembangunan kebun buah-buahan seluas 10.460 ha, tersebar di 31 kabupaten di 15 propinsi. Jenis komoditi yang dikembangkan disesuaikan dengan unggulan daerah masing-masing dan mempunyai nilai ekonomis tinggi antara lain jeruk, pisang, mangga, salak, rambutan, durian, markisa dan melinjo. Selain pembangunan kebun, juga telah dibangun fasilitas pendukung seperti pengembangan sarana kebun (sumur, pompa, embung/bak penampung, jaringan pipa pengairan, jalan usaha tani, bangunan pengumpul dan pengepakan), serta peningkatan SDM (petani, penangkar benih, dan petugas).
- Pengembangan agribisnis tanaman anggrek di tiga propinsi sentra, yaitu Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Bali. Jenis anggrek yang dikembangkan antara lain Sakura, White, Water Omae X Waipahu Beauty, Drlon Pink, dan Sonia 28.
- Pengembangan intensifikasi seluas 2.790 ha dengan memanfaatkan dana KUT sebesar Rp.8,1 milyar atau 105 persen dari maksimum CO TA. 1998/99 sebesar Rp.7,7 milyar.
- Pengembangan cabai merah dan bawang merah di luar musim (off season) dalam rangka penyediaan produksi sepanjang tahun guna mengantisipasi kelangkaan dan gejolak harga terutama pada hari raya besar di kota besar. Untuk TA 1998/1999 telah berhasil dikembangkan penanaman bawang merah (off season) seluas 550 ha di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan cabe merah seluas 350 ha di Jawa Barat dengan tujuan memasok kebutuhan Ibukota Jakarta dan sekitarnya.
- Pembinaan pengembangan usaha hortikultura di Lembaga Mandiri dan Mengakar di Pedesaan (LM-3) di 23 Pondok Pesantren di 15 propinsi, dengan kegiatan usaha dan jenis komoditas yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.



- Pembinaan pengembangan model alsin (penyediaan air) hortikultura di 10 propinsi sentra produksi (Aceh, Bengkulu, Sumsel, Jabar, Jatim, NTB, Kaltim, Sulut, Sulteng dan Sultra.

c. Pengembangan Lahan

Kegiatan pokok pengembangan dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan dalam dalam rangka mendukung pengembangan tanaman pangan dan hortikultura antara lain:

- Pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan Tengah dengan penanaman padi setiap musim berkisar 16.000 ha dengan tingkat produktivitas antara 2,5-3 ton GKP per ha. Selain dimanfaatkan untuk padi, juga dikembangkan komoditas palawija dan hortikultura. Disamping itu, juga telah dilakukan pilot proyek percontohan budidaya dan model usahatani untuk mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani.
- Pembinaan gerakan hemat air melalui pembinaan terhadap kelembagaan tani pemakai air/P3A .
- Perbaiki jaringan irigasi tingkat usahatani berupa : pengembangan pompanisasi 1.639 unit, pengembangan embung tujuh unit, perbaikan jaringan irigasi tingkat usahatani 15.500 unit, dan perbaikan tata air mikro untuk pengembangan padi melalui peningkatan IP 100-200 di lahan pasang surut seluas 146.000 ha.

d. Gerakan Intensifikasi

Rencana dan realisasi tanam intensifikasi padi, kedelai dan jagung pada TA 1998/1999 dan TA 1999/2000 adalah sebagai berikut (Tabel 4.2). Pada Tabel 4.2 tampak bahwa untuk T.A. 1997/1998 dan T.A. 1998/1999 baik padi maupun jagung, arealnya mencapai sasaran, kecuali kedelai hanya terealisasi 64 sampai 74 persen dari rencana. Tidak tercapainya areal tanaman kedelai ini disebabkan antara lain: (1) tingkat kesesuaian lahan dan iklim yang kurang mendukung, (2) teknologinya belum dikuasai petani, (3) resiko tinggi terutama dalam pengendalian hama, (4) di beberapa daerah pemasaran sulit, (5) penyediaan benih bermutu dengan tingkat produktivitas tinggi masih sangat kurang.



Untuk T.A. 1998/1999, kegiatan intensifikasi baru mulai dilaksanakan, sehingga pencapaian areal intensifikasi padi baru 15,23 persen, kedelai 10,87 persen dan jagung 7,57 persen. Pencapaian areal tanam kedelai tetap lebih rendah dari padi maupun jagung.

2. Peternakan

a. Kegiatan Pembinaan

(1). Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU)

Kegiatan ini merupakan suatu sistem usaha tani dengan ternak sebagai komoditi unggulan yang dilaksanakan melalui peningkatan produksi secara terpadu, berskala ekonomis, berkelanjutan dengan kemandirian dan berorientasi agribisnis. Selama TA. 1998/1999 kegiatan ini telah berhasil meningkatkan populasi ternak yang disebarakan di wilayah pada 43 kabupaten (di 25 propinsi), dengan kenaikan masing-masing komoditas sebagai berikut: sapi 55 persen; domba 36,9 persen; ayam buras 159,8 persen; itik 532 persen dan babi 46,6 persen. Dari peningkatan populasi tersebut pemilikan ternak per keluarga akan meningkat, dan hasil selanjutnya adalah akan meningkatkan efektivitas produksi sesuai skala ekonomi yang layak.

(2). Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)

Kegiatan LM3 dimulai sejak TA. 1997/1998 di 13 propinsi pada 26 pondok pesantren. Sampai dengan TA. 1998/1999 telah berkembang di 22 propinsi sebanyak 68 pondok pesantren, empat seminari dan dua pasraman. Kegiatan ini telah meningkatkan populasi dan produksi sejumlah komoditas yang diusahakan disamping meningkatkan kemampuan lembaga keagamaan tersebut dalam hal memandirikan diri melalui kegiatan agribisnis peternakan.

(3). Pemberdayaan Peternakan

Melalui kegiatan Gema Proteina TA. 1998/1999 dan TA. 1999/2000 telah dilaksanakan upaya pemberdayaan peternak skala kecil. Volume kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



- Pengadaan ternak ayam buras 163.205 ekor (79,0 %) dan jumlah peternak yang dibina 4.180 KK (100,0 %) di 12 propinsi pada 22 kabupaten.
- Pengadaan itik 93.915 ekor (188,0 %) dengan jumlah peternak yang dibina 1.022 KK (102,2 %) di tiga propinsi pada lima kabupaten.
- Pengadaan ternak kambing 9.088 ekor (95,0 %) dengan jumlah peternak yang dibina 1.325 KK (100,0 %) di tujuh propinsi pada 10 kabupaten.
- Pengadaan ternak domba 7.043 ekor (106,0 %) ekor dengan jumlah peternak yang dibina 850 KK (113,0 %) di lima propinsi pada delapan kabupaten.
- Pengadaan sapi potong 2.540 ekor (96,5 %) dengan jumlah peternak yang dibina 920 KK (104,6 %) di delapan propinsi pada sembilan kabupaten.
- Pengadaan sapi perah 1.002 ekor (87,0 %) dengan jumlah peternak yang dibina 694 KK (129,0 %) di empat propinsi pada enman kabupaten.

Pengadaan komoditas-komoditas tersebut dilaksanakan petani ternak sendiri, sebab dana dialokasikan langsung pada rekening petani, sehingga petani dapat menentukan dan membeli kebutuhan yang diperlukannya. Kegiatan ini secara makro telah memberikan sumbangan terhadap peningkatan populasi ternak kambing, domba dan ayam buras yang mengalami penurunan pada tahun 1998 yang lalu. Pada tahun 1999 data sementara menunjukkan populasi ternak tersebut meningkat dibanding tahun 1998.

(4). Pembibitan Ayam Buras dan Pembangunan Rumah Potong Hewan

Melalui pembiayaan dari SPL OECF INP-23 subsektor peternakan memperoleh dana Rp. 100 milyar untuk membiayai pengembangan perbibitan ayam buras yang berupa *Infrastructure Development for Poultry Rural Rearing Multiplication Center (RRMC)* dan pembangunan rumah potong hewan dalam rangka kegiatan *Development of Livestock Marketing and Slaughterhouse Project (DLMS)*. Jangka waktu pelaksanaan proyek adalah dua tahun.



(5). Inseminasi Buatan

Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dilaksanakan melalui intensifikasi sapi potong (INSAPP) dan non INSAPP atau IB reguler. Pada TA.1998/1999 program INSAPP melalui IB dikembangkan lagi menjadi 13 propinsi (yang terdiri dari tujuh propinsi lokasi lama yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan NTB; dan enam propinsi lokasi baru yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan Sulawesi Selatan).

Sampai dengan Desember 1998 tercatat kebuntingan ternak sebanyak 87.054 ekor dari hasil IB TA.1998/1999. Diharapkan pada awal TA.1999/2000 ternak tersebut akan lahir dan merupakan tambahan populasi atau ternak bakalan yang siap digemukkan. Dari kelahiran ternak hasil IB Program INSAPP TA.1997/1998 yang tercatat sebanyak 210 ribu ekor dapat dijadikan ternak akseptor baru dan ternak bakalan untuk digemukkan.

Pada kegiatan IB reguler, untuk tahun anggaran 1999/2000 pelaksanaan IB sapi direncanakan sebesar 1.600.000 dosis di 13 propinsi. Dengan alokasi dari semen tersebut, hasil yang diharapkan adalah sapi bakalan sebanyak 360 ribu ekor yang siap digemukkan pada T.A. 2001/2002. Upaya ini diharapkan membantu mengatasi kekurangan sapi bakalan impor.

(6). Pengamanan Ternak

Dalam kurun waktu tahun 1997-1999 hasil kegiatan yang terkait dengan pengamanan ternak adalah:

- a. Swastanisasi Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan). Untuk meningkatkan kemampuan Poskeswan dalam pengamanan lingkungan budidaya ternak, dengan dana yang terbatas diharapkan Poskeswan dapat mandiri. Untuk itu pada TA. 1998/99 sampai dengan TA. 1999/2000 telah diupayakan sebanyak 23 Poskeswan sebagai pilot project. Hasil yang diperoleh ternyata sejumlah Poskeswan tersebut sampai saat ini belum dapat mandiri. Hal ini sebagai akibat belum adanya aturan yang mendukung untuk menggunakan kembali dana yang diperoleh oleh Poskeswan untuk membiayai dirinya



sendiri. Pada masa yang akan datang, terkait dengan otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengupayakan program Poskeswan Mandiri tersebut.

- b. Pemberantasan penyakit hewan menular strategis selama tahun anggaran 1997/1998 sampai 1999/2000 telah diupayakan pemberantasan penyakit rabies di 21 propinsi dan brucellosis di 26 propinsi. Melalui upaya ini telah berhasil diturunkan kasus rabies dari 1.522 kasus tahun 1997 menjadi 1.047 kasus tahun 1998. Disamping itu telah berhasil dibebaskan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta dari penyakit rabies yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 89 tahun 1997, sementara propinsi DKI Jakarta telah tiga tahun bebas kasus, sedang di Jawa Barat pada tahun 1999 tinggal satu kasus. Dalam pemberantasan Brucellosis, melalui metoda Test and Slaughter 11 propinsi yang tertular rabies dapat dihilangkan kasusnya. Dengan demikian dari 26 propinsi yang tertular sampai dengan tahun 1996 dapat diturunkan menjadi 15 propinsi pada tahun 1998.

b. Perkembangan Populasi Ternak

Populasi ternak tahun 1998 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1997 (Tabel 4.3). Hal tersebut di atas merupakan akibat dari terjadinya kemarau panjang, krisis moneter dan ekonomi yang terjadi pada kurun waktu 1997-1998. Pada subsektor peternakan keadaan ini mengakibatkan terpuruknya industri peternakan khususnya industri peternakan ayam ras, industri feedloters, industri pakan yang bahan bakunya berasal dari impor serta industri obat-obatan hewan yang kesemuanya mengandalkan pada pasokan impor.

Pada tahun 1999 diperkirakan terjadi pemulihan. Populasi ternak diharapkan meningkat kembali, yang merupakan hasil dari reformasi pembangunan peternakan dan mulai pulihnya kembali perekonomian nasional. Diantara keberhasilan upaya di bidang peternakan yang mendorong pertumbuhan populasi adalah :

- Keberhasilan INSAPP yang telah melahirkan 210 ribu ekor sedikit banyak akan berpengaruh terhadap peningkatan sapi potong.
- Pemulihan industri perunggasan (penanggungan PPn Pakan dan penyediaan skim kredit). Sampai saat ini skim kredit yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp. 1,8 milyar untuk 37 paket.



c. Perkembangan Produksi Hasil-Hasil Ternak

Perkembangan produksi hasil-hasil ternak sangat terkait erat dengan perkembangan populasi ternak. Produksi daging, telur dan susu periode 1997-1999 disajikan dalam Tabel 4.4.

(1). Daging

Pada kurun waktu 1997 - 1998 produksi daging mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena penurunan populasi dan juga pasokan dari impor. Impor sapi bakalan dari 370 ribu ekor pada tahun 1997 menjadi sekitar 30 ribu ekor pada tahun 1998. Untuk tahun 1999 melihat data-data beberapa bulan pertama, produksi daging diharapkan akan meningkat sebesar 7,67 persen. Kemungkinan peningkatan ini diharapkan dari meningkatnya populasi ayam pedaging, ayam buras dan juga sapi.

(2). Telur

Pada kurun waktu 1997 - 1998 produksi telur mengalami penurunan sebesar 30,75 persen, dan populasi ayam ras yang paling banyak mengalami penurunan yaitu sebesar 44,75 persen. Hal ini karena adanya krisis ekonomi yang menyebabkan bahan baku pakan asal impor mengalami kenaikan harga. Sebaliknya produksi telur ayam buras mengalami kenaikan sebesar 3,02 persen, yang menandakan bahwa ayam buras tidak terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi. Pada tahun 1999 produksi telur diharapkan mengalami kenaikan sebesar 2,37 persen. Harapan kenaikan ini didasarkan adanya peningkatan populasi ayam petelur sebagai hasil dari restrukturisasi industri ayam ras petelur dan meningkatnya populasi ayam buras.

(3). Susu

Sama halnya dengan produksi daging dan telur, produksi susu juga mengalami penurunan pada kurun waktu 1997 - 1999 sebesar 39,0 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 1999 sebesar 2,37 persen. Penurunan produksi susu disebabkan antara lain oleh menurunnya populasi ternak sapi perah, karena banyaknya ternak sapi perah yang dipotong untuk keperluan pemenuhan daging sapi.



3. Perikanan

Berbagai program pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan pada era reformasi ini, secara keseluruhan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya produksi perikanan. Keberhasilan tersebut diupayakan dengan tetap menjamin pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

a. Produksi Perikanan

Pada periode 1997-1998, produksi perikanan meningkat 5,62 persen yaitu dari 4.579,77 ribu ton menjadi 4.837,00 ribu ton. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor, konsumsi dalam negeri dan bahan baku industri tepung ikan; produksi perikanan ditargetkan sebesar 5.721,81 ribu ton pada tahun 1999 atau meningkat sebesar 18,29 persen dari produksi tahun sebelumnya. Produksi perikanan laut diharapkan juga meningkat sebesar 14,45 persen guna memenuhi ketiga permintaan tersebut. Peningkatan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 1997-1998 yang besarnya 6,20 persen. Produksi penangkapan di perairan umum yang selama ini digunakan untuk konsumsi dalam negeri, masih tetap diarahkan untuk keperluan yang sama di masa mendatang, bahkan sebagian produksi dari usaha budidaya di darat diarahkan juga untuk ekspor. Meskipun pada tahun 1998 produksi dari usaha ini hanya meningkat relatif kecil, yaitu hanya 0,57 persen dari produksi tahun 1997, namun pada tahun 1999 diharapkan bisa meningkat dengan adanya peningkatan kegiatan *restocking* di perairan umum dan balai-balai benih ikan milik pemerintah.

Produksi budidaya tambak diharapkan meningkat sebesar 35,28 persen pada periode tahun 1998 - 1999. Peningkatan ini juga jauh lebih besar dari peningkatan pada tahun sebelumnya, karena hasil budidaya ini terutama diarahkan untuk ekspor. Untuk produksi budidaya di air tawar, peningkatannya mengikuti pola yang sama, karena mulai tahun 1999, hasil dari usaha budidaya ini tidak saja diarahkan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri tetapi juga diarahkan untuk ekspor. Selain kodok lembu yang sudah lama masuk dalam pasar ekspor, ikan nila dan labi-labi diharapkan dapat menembus



pasar luar negeri. Secara rinci perkembangan produksi perikanan selama 1997-1999 disajikan dalam Tabel 4.5.

b. Sarana Produksi Perikanan

Produksi perikanan selama ini mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya sarana produksi. Jumlah perahu/kapal penangkap ikan pada tahun 1998 meningkat 2,61persen dibandingkan dengan tahun 1997 sebesar 402.104 buah. Pada tahun 1999, jumlah perahu kapal ini diperkirakan akan meningkat 1,35 persen dari tahun 1998. Luas areal budidaya pada tahun 1998 meningkat 5,56 persen dari luas areal pada tahun 1997. Pada tahun 1999, luas areal ini diharapkan meningkat sebesar 28,30 persen untuk menghasilkan produksi yang telah ditargetkan.

c. Perdagangan Hasil Perikanan

Perkembangan volume ekspor hasil perikanan pada tahun 1998 cukup menggembirakan, kecuali rumput laut yang pertumbuhannya negatif. Meskipun volume ekspor ini naik 14,33 persen namun nilainya hanya meningkat 0,89 persen. Hal ini mencerminkan bahwa mutu komoditas yang diekspor masih belum memenuhi harapan negara pengimpor sehingga harga rata-ratanya rendah. Pada tahun 1999, mutu produk ekspor ini akan lebih ditingkatkan hingga mempunyai nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, pada tahun ini diharapkan perolehan devisa hasil perikanan meningkat 45,62 persen dari tahun sebelumnya dan volume eksportnya meningkat 24,57 persen. Pada tahun 1999, volume ekspor udang diperkirakan menurun dari tahun 1998, tetapi dengan perbaikan mutu, diharapkan harganya naik, sehingga nilainya dapat meningkat. Secara rinci ekspor hasil perikanan disajikan dalam Tabel 4.6.

Impor hasil perikanan menunjukkan kecenderungan menurun, baik volume maupun nilainya. Bahkan tepung ikan yang masih merupakan bagian terbesar impor hasil perikanan, dalam periode tahun 1997-1999 menunjukkan penurunan, terutama disebabkan oleh harga yang menjadi mahal akibat penurunan nilai tukar rupiah. Penurunan impor yang sangat tajam terjadi pada impor tepung iikan yaitu mencapai 69,36 persen. Pada tahun 1997 impor tepung ikan yang digunakan



sebagai bahan baku pakan ternak ini mencapai 115.180 ton, namun pada tahun berikutnya menurun tajam menjadi 35.291 ton. Begitu pula dengan impor ikan segar/beku yang umumnya diperuntukkan bagi konsumsi restoran dan hotel. Pada tahun 1997 impor komoditi ini masih sebesar 11.876 ton, akan tetapi pada tahun 1998 menurun tinggal 4.236 ton atau menurun 64,33 persen. Secara rinci impor hasil perikanan disajikan dalam Tabel 4.7.

4. Agribisnis

Pengembangan agribisnis yang dilaksanakan melalui pengembangan mutu produk, pengembangan pasar dan informasi pasar, pengembangan kelembagaan pedesaan serta pengembangan investasi dan permodalan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

a. Pengembangan Mutu Produk Pertanian

Telah disusun beberapa SNI sektor pertanian yang mencakup standar untuk mutu produk akhir maupun standar-standar lain seperti standar bahan baku, standar metode pengolahan, standar peralatan dan standar metode pengujian.

Telah disusun Rencana Kerja Jaminan Mutu (RKJM) bagi kelompok tani dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem penanganan pasca panen; dan meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan sistem jaminan mutu secara mandiri.

Pengembangan akreditasi dan sertifikasi yang difokuskan kepada pengembangan kelembagaan sertifikasi dan kelembagaan petani sebagai pengguna sertifikat agar mempunyai kemampuan dalam memberikan jaminan mutu hasil pertanian yang kredibel dan terakreditasi dan secara efisien dan mandiri.

Pengembangan kerja sama standardisasi ditujukan untuk menghasilkan suatu harmonisasi, ekivalensi serta transparansi sistem jaminan mutu antara Indonesia dan negara-negara mitra bisnis guna memperlancar arus ekspor hasil pertanian. Program-program kerjasama standardisasi pada jangka pendek yang telah dilakukan adalah mencakup:



- Penanganan dan penyelesaian masalah penahanan otomatis kakao dan udang oleh Amerika dan pembinaan mutu di tingkat hulu sampai hilir;
- Pola kerja sama Penyelarasan Sistem Pembinaan Mutu Hortikultura dengan Malaysia, Singapura dan Jepang;
- Pengembangan jaminan mutu dengan Metode SQF 2000 (dalam rangka kerjasama Indonesia Australia); dan
- Harmonisasi standardisasi dengan Uni Eropa dalam rangka menembus pasar unggas Eropa.

b. Pengembangan Pasar dan Informasi Pasar

Terwujudnya home page Agribisnis Indonesia On-line dengan alamat: <http://www.fintrac.com/indoag> sebagai medium untuk menghadirkan pasar, mempertemukan penjual dan pembeli sehingga biaya transaksi dapat ditekan. Dengan demikian akan terjadi link and match antara pembeli dan penjual. Agribisnis Indonesia On-line dapat diakses gratis 24 jam/hari, 365 hari/tahun.

Menerbitkan informasi berkala dalam bentuk agribisnis yang datanya diolah dan dianalisis dari internet dan telah didistribusikan kepada unit kerja yang terkait dalam pengembangan agribisnis, baik di pusat maupun di daerah.

Terbangunnya sub terminal agribisnis di Cicurug Sukabumi sebagai tempat kegiatan pengolahan pasca panen seperti sortasi, grading dan pengemasan serta kegiatan magang untuk anggota kelompok tani. Disamping itu dapat pula sebagai sumber informasi peluang pasar, indikasi perubahan selera konsumen dan harga serta sarana promosi.

c. Pengembangan Kelembagan Pedesaan

- Telah berhasil diuji coba model pengembangan UPJA di tujuh propinsi, yang mewakili lima tipe agroekosistem pertanian, yaitu lahan irigasi teknis, lahan tadah hujan, lahan kering, lahan pasang surut dan lahan rawa dalam.
- Telah dilakukan identifikasi terhadap 128 pondok pesantren di tujuh propinsi yang memiliki potensi sebagai pengembangan agribisnis bagi masyarakat di sekitarnya. Dari



sejumlah pondok pesantren yang ada dalam propinsi telah ditunjuk satu pondok pesantren percontohan. Diantara pondok pesantren tersebut adalah Al Qomariah dan Al Ittifaq di Bandung - Jawa Barat, Sabilil Muttaqin di Magetan - Jawa Timur, Attohiriyah Alfadiliyah Bodak di Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat, Al Kautsar AlGontory Aikmel di Lombok Timur, NTB, serta Hidayatullah di Balikpapan - Kalimantan Timur.

- Terbentuknya 130 Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA); dan
- Terbentuknya sejumlah 20 unit Koperasi Agribisnis Komoditas Unggulan (KOPAKU) sebagai unit-unit usaha yang berskala ekonomis dan berorientasi agribisnis.

d. Pengembangan Investasi dan Permodalan Agribisnis

Telah disalurkan Skim Kredit Taskin Agribisnis yang bersumber dari yayasan Dakab sebesar Rp.7,8 milyar (52%) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) di enam propinsi, yaitu BPD Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Yogyakarta dan NTT.

Telah direalisasikan penyaluran KKPA Unggas sampai dengan bulan April 1999 sebesar Rp. 304,5 juta kepada 21 orang peternak yang tergabung dalam Koperasi Darussalam di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun Perusahaan Intinya adalah PT. Japfa Mitra Sentosa dan selaku bank pelaksana adalah Bank IFI. Pada saat ini masih menunggu 22 koperasi di empat kabupaten untuk mendapatkan KKPA Unggas.

PT. Bahana Artha Ventura, sampai dengan 31 Desember 1998 telah menyalurkan modal ventura kepada pengusaha agribisnis berjumlah 26 PMV mencapai jumlah sebesar Rp. 114,8 milyar, dengan jumlah terbesar disalurkan oleh PT Sarana NTB Ventura yaitu sebesar Rp. 11,7 milyar. Modal ventura tersebut telah disalurkan untuk usaha subsektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan.



5. SDM Pertanian

a. Pendidikan Formal

Pendidikan Menengah Pertanian dilaksanakan pada 20 Sekolah Pertanian Pengembangan (SPP) Negeri 78 SPP Daerah dan 88 SPP Swasta, yang dibagi di dalam tiga kelompok besar bidang studi yaitu: pertanian/hortikultura, peternakan dan perikanan.

Jumlah APP sampai dengan tahun ketiga Pelita VI tidak mengalami perubahan, sesuai dengan yang diproyeksikan, yaitu enam APP, masing-masing di Medan (Program Studi Pertanian), Bogor (Pertanian, Peternakan dan Perikanan), di Tegalrejo/Megelang (Peternakan), Yogyakarta (Pertanian), di Malang/Sidoarjo (Pertanian, Peternakan dan Perikanan) dan Gowa (Pertanian).

Departemen Pertanian bekerja sama dengan Universitas Terbuka menyelenggarakan program studi D3 penyuluh pertanian dengan sistem belajar jarak jauh. PTPL adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan di APP. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertanian Lapangan (PTPL) dilaksanakan berdasarkan naskah kerja sama antara Departemen Pertanian dengan Universitas Terbuka Nomor DL. 420/2162/13/XI/91 dan Nomor 7211/PT.45/1/91 tanggal 19 Nopember 1991.

Selama tiga tahun terakhir, jumlah mahasiswa PTPL cenderung meningkat. Pada tahun akademik 1997/1998, jumlah mahasiswa PTPL adalah 1.117 orang, yang terdiri dari 932 orang untuk Program Studi Pertanian, 114 orang Program Studi Peternakan dan 71 orang Program Studi Perikanan. Pada tahun akademik 1998/1999, jumlah mahasiswa PTPL meningkat menjadi 1.150 orang, masing-masing terdiri dari 954 orang untuk Program Studi Pertanian, 119 orang Program Studi Peternakan dan 77 orang Program Studi Perikanan. Pada tahun akademik 1999/2000, jumlah mahasiswa PTPL diperkirakan meningkat menjadi 1.200 orang, terdiri dari 1.000 orang untuk Program Studi Pertanian, 120 orang Program Studi Peternakan dan sisanya 80 orang untuk Program Studi Perikanan.



Sekolah Tinggi Perikanan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi perikanan yang dikelola Badan Diklat Pertanian. Sekolah ini menyelenggarakan Program D4, yang terdiri dari lima program/bidang studi, yaitu : Teknik Penangkapan Ikan,; Teknik Pengelolaan Hasil Perikanan, Teknik Mesin Perikanan, Teknik Akuakultur, dan Teknik Pengelolaan Sumberdaya Perairan.

b. Pembinaan Petani

(1). Magang Petani Muda di Jepang

Salah satu pembinaan yang dilakukan kepada petani-nelayan, khususnya pemuda tani/nelayan adalah dengan cara mengirimkan mereka magang ke luar negeri, khususnya di Jepang. Realisasi pencapaian jumlah sasaran pengiriman pemuda tani/nelayan ke Jepang selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 1997/1998, jumlah pemuda tani yang dikirim magang ke Jepang sebanyak 56 orang dan meningkat menjadi 95 orang pada tahun 1998/1999 serta diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 110 orang pada tahun 1999/2000.

Magang ke Jepang dilaksanakan selama jangka waktu delapan sampai dengan dua belas bulan di usahatani petani Jepang, disesuaikan dengan usahatani masing-masing para peserta magang. Sejak dimulainya program ini pada tahun 1984, telah dilakukan kerja sama dengan empat asosiasi petani Jepang yaitu JAEC Tokyo, JAEC Fukui, NAEC Niigata dan IAEA Gunma. Selama di Jepang mereka menyusun rencana pengembangan usahatani di Indonesia. Berdasarkan pengalaman, ternyata para alumni tersebut masih memerlukan pembinaan dan bantuan dari instansi pembina baik dalam bentuk teknis maupun dukungan permodalan, khususnya manajemen usaha, teknologi maju dan kredit usahatani.

(2). Pembinaan Petani/Nelayan Kecil

Pembinaan petani-nelayan kecil melalui penumbuhan kelompok-kelompok usaha yang dilakukan melalui Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) bertujuan membangun perilaku sasaran petani-nelayan yang



pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan untuk bisa menolong dirinya sendiri dengan prinsip-prinsip pengembangan diri secara utuh yang meliputi: 1) pendekatan kelompok; 2) keserasian; 3) kepemimpinan dari dalam; 4) pendekatan kemitraan; 5) swadaya; 6) belajar sambil bekerja; dan 7) pendekatan keluarga.

Proyek P4K yang mulai digulirkan tahun 1976 dan kemudian dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 1989/1990, saat ini dilaksanakan di 18 propinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Timor Timur. Pada 12 propinsi yang disebut terakhir, kegiatannya baru dimulai pada tahun 1994/1995, bersamaan dengan dimulainya program IDT.

Perkembangan jumlah kelompok yang telah dibina selama 3 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 1997/1998, pembinaan telah menjangkau sekitar 48.969 kelompok dan meningkat menjadi 49.711 kelompok pada tahun 1998/1999. Selanjutnya pada tahun 1999/2000, pembinaan kepada petani-nelayan kecil diperkirakan dapat menjangkau sekitar 55.000 kelompok.

(3). Pengembangan Desa Mitra.

Pengembangan Desa Binaan (Desa Mitra) merupakan suatu kegiatan pembinaan masyarakat desa dalam bidang usaha pertanian yang dilaksanakan oleh UPT Diklat Pertanian di daerah untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk: (1) membina dan meningkatkan pengetahuan masyarakat pedesaan sekitar kampus tentang pengelolaan usaha pertanian yang berwawasan agribisnis; (2) meningkatkan pendapatan masyarakat desa binaan melalui usaha di bidang pertanian; dan (3) mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelengguan budaya bertani secara tradisional.



6. Penelitian dan Pengembangan Pertanian

a. Tanaman Pangan

Hasil penelitian tanaman pangan yang menonjol dan diharapkan dapat segera memiliki dampak yang luas terhadap peningkatan produksi antara lain varietas unggul, teknik budidaya, pengendalian hama dan penyakit, dan pengelolaan pasca panen. Beberapa paket teknologi hasil penelitian pada tahun 1997/98 dan 1998/99 secara ringkas dijelaskan dibawah.

(1). Sistem Usahatani Lahan Pasang Surut

Hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu teknik terpadu yang produktif dan berkelanjutan untuk lahan pasang surut, lahan gambut dan lahan rawa dangkal. Teknik yang dihasilkan termasuk penyediaan lima varietas unggul padi yang adaptif lingkungan berdaya hasil tinggi, teknik pengelolaan hara, teknik pengelolaan air dan pengendalian senyawa beracun pirit dan sulfat masam. Teknik ini telah diuji secara luas di lahan pasang surut Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dengan hasil baik dengan produktivitas mencapai 4-5 ton GKG/ha.

(2). Model Pengembangan Sistem Usaha Pertanian (SUP)

Teknologi ini mengutamakan efisiensi penggunaan sarana produksi dan memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya pertanian dan pendapatan petani. Khusus untuk peningkatan efisiensi penggunaan pupuk terutama nitrogen diupayakan dengan menggunakan bagan warna daun (leaf colour chart = LCC). Dengan alat yang sangat sederhana ini petani dapat menentukan secara tepat dosis dan waktu aplikasi pupuk nitrogen, yang dapat menghemat biaya pupuk 15-20 persen.

(3). Varietas Unggul Padi dan Jagung

Varietas unggul padi tahan hama wereng biotipe 2 dan 3, penyakit bakteri hawar daun (kresek) dan virus tungro, yang telah dihasilkan adalah: Membramo, Maros, Way Apo Buru,



Digul, Cirata. Selain itu telah pula dilepas tahun 1999 varietas padi rawa Batang hari dan Dendang, padi sawah Widas, padi ketang Ketonggo, dan padi gogo Limboto. Untuk menyediakan benih jagung hibrida dengan harga murah (50% dari harga benih hibrida swasta) telah dihasilkan berbagai hibrida jagung yakni Semar-2, Semar-3, Semar-4, 5, 6, 7,8, dan Semar-9 yang benihnya sudah diproduksi oleh BUMN. Untuk wilayah lahan kering marginal telah disediakan varietas jagung bersari bebas yakni yaitu Wisanggeni, Bisma, Lagaligo, Antasena, dan Surya yang daya hasilnya mencapai 5 ton/ha. Pelepasan varietas unggul jagung tahan penyakit bulai, toleran terhadap penyakit karat daun, daya hasil 11,0-11,7 ton/ha, beradaptasi baik pada penanaman musim kemarau dan penghujan : BISI-5, BISI-6, BISI-7 dan BISI-8.

(4). Varietas Kacang-kacangan dan Umbi-umbian

Untuk mendukung program peningkatan produksi kacang-kacangan dan ubi-ubian telah dilepas lima varietas unggul kedelai : Argo Mulyo, Leuser, Kawi, Bromo, Meratus yang toleran penyakit karat daun, tahan rebah, polong tidak mudah pecah, sesuai untuk produksi susu atau pembuatan tahu, produktivitas 2 ton/ha, dan terakhir tahun 1999 dilepas kedelai varietas Burangrang; tiga varietas unggul kacang tanah: Panther, Jerapah, Singa yang toleran penyakit layu, karat dan becak daun, beradaptasi luas termasuk di lahan masam dengan produktivitas 2,6 ton/ha.; empat varietas unggul kacang tunggak yaitu KT-6, KT-7, KT-8, KT-9 mempunyai ketahanan hama polong dan agak tahan terhadap virus CAMP, daya hasil rata-rata 1,1 ton/ha dan beradaptasi luas di berbagai ekosistem.; satu varietas kacang hijau yaitu Kenari dengan produktivitas tinggi 1,38 ton/ha, tahan terhadap penyakit bercak daun, toleran penyakit karat; dua varietas ubi jalar yaitu Sewu, Cangkung dengan produktivitas 30 ton/ha, tahan hama lanas dan penyakit kudis, bentuk dan kualitas umbi bagus, rasa umbi manis dan cocok ditanam pada tegal atau sawah tadah hujan setelah padi atau pada tanah yang tidak terlalu subur; dan satu varietas ubi kayu yaitu Darul Hidayah (lokal spesifik) dengan potensi hasil tinggi yaitu 100 ton/ha, kadar HCN rendah (< 40 mg/Kg) rasa kenyal seperti ketan.



b. Hortikultura

Dari penelitian dan pengembangan hortikultura yang menonjol meliputi varietas unggulan, pengendalian hama dan penyakit, teknologi pasca panen.

(1). Varietas Unggul.

Varietas-varietas unggul hortikultura yang dilepas tahun 1998/99 mencakup:

- Delapan varietas bunga krisan yaitu Saraswati, Sekartaji, Purbasari, Retno Dumilah, Dewi Sartika, Kartini, Larasati dan Candra Kirana yang mempunyai diameter bunga lebar (> 6 cm) dan tangkai bunga panjang (< 80 cm);
- Satu varietas bunga gladiol yaitu Dayang Sumbi yang mempunyai kumtum bunga rapat, susunan bunga simetris, tangkai bunga keras;
- Satu varietas rambutan yaitu Tangkur Lebak dengan daging buah ngelotok, rasa manis sedikit asam, tahan terhadap embun tepung, dan produksi per pohon 300 kg;
- Satu varietas kelengkeng yaitu Selarong yang mempunyai rasa buah manis legit, harum, daging buah tebal, jumlah buah per tandan 150 buah, dan produksi buah per pohon 250 kg;
- Dua varietas belimbing yaitu Dewi Murni dan Dewa Baru yang mempunyai rasa manis segar agak berserat, aroma harum, umur simpan 10-14 hari, umur panen 90-110 hari, produksi per pohon per tahun 400-700 kg berbuah sepanjang tahun;
- Tiga varietas jeruk yaitu Siem Banjar, Keprok So E dan Manis Kisar yang mempunyai rasa manis segar, aroma lembut, diameter buah 6,5 - 7,5 cm, tahan pengangkutan, produksi buah 500-1000 buah/pohon/tahun;
- Satu varietas durian yaitu Soya dengan rasa daging manis, tidak berserat, warna kuning, tahan pengangkutan, produksi 100-150 buah/pohon/musim;
- Satu varietas sirsak yaitu Sirsak Ratu-I yang mempunyai rasa manis legit, berserat halus dan tidak berair, warna buah putih susu, aroma harum, kulit buah tipis, berat per buah 0,5-2,3 kg.
- Pada tahun 1999 telah dilepas tiga varietas buncis rambat, Horti-1, Horti-2, dan Horti-3; tiga varietas tomat, Mirah, Opal, dan Zamrud; 3 varietas mentimun, Saturnus, Pluto, dan Mars.



(2). Teknologi Pasca Panen

Beberapa teknologi pengolahan/pasca panen komoditas hortikultura telah dihasilkan, diantaranya:

- Teknologi pembuatan tepung bawang merah dengan proses pembuatan tepung bawang merah dimulai dari pengeringan lapang, pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pengayakan dengan 50 atau 60 mesh, pengemasan dan penyimpanan. Alat pengering model Balitro dengan perendaman emulsi Desol memperoleh cabai kering yang baik, dilihat dari kadar air yang diperoleh 11 persen (lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan pengering LIPI maupun dihampar yaitu 12 - 13 persen, dan nilai kepedasan 1980,00 S.U.
- Metoda pembuatan pasta tomat dimulai dari memilih bahan yang kondisinya matang merah merata, dilanjutkan dengan perlakuan blansing pada suhu 90°C selama 3 menit. Untuk menstabilkan tekstur pasta dilakukan penambahan tepung maizena untuk mendapatkan mutu pasta tomat dengan kadar asam dan kadar padatan (bahan kering) tinggi, kadar air (73-76 %).
- Teknologi tepung bawang putih sebagai pengganti bawang putih segar mengingat tepung bawang putih lebih praktis digunakan, dapat tahan lama dan lebih mudah dalam pengemasan maupun mengakutan. Flafor dalam bawang putih sangat sensitif terhadap panas. Komponen flavor merupakan komponen penting dalam irisan bawang putih, karena dipengaruhi oleh enzim allinase yang akan membentuk allizin. Enzim allinase yang berperan dalam pembentukan flavor khas bawang putih mempunyai aktivitas maksimum pada pH 7.
- Teknologi untuk mempertahankan dan memperpanjang waktu kesegaran bunga potong, sayuran dan buah-buahan.

c. Perikanan

Hasil penelitian dan pengembangan perikanan mencakup perikanan air tawar, perikanan budidaya pantai dan perikanan laut, yang secara ringkas disajikan berikut ini.



(1). Pemanfaatan Lahan Tambak.

Untuk lahan tambak telah dikembangkan teknologi pemanfaatan tambak garam secara multi-cropping, yang komoditasnya terdiri atas kombinasi garam, garam dan artemia serta udang dan bandeng. Produksi artemia dari usaha ini diperlukan untuk mendukung perbenihan dan pembesaran larva untuk budidaya ikan laut dan udang. Teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung usaha ini adalah teknologi pascapanen artemia, terutama untuk pengawetan dan pengemasan, sehingga artemia dapat disimpan dalam waktu lama dan/atau didistribusikan lebih lanjut.

(2). Perbenihan, Pembesaran, Pakan, Pengangkutan.

Teknologi perbenihan ikan laut saat ini telah mulai dikuasai. Panti Benih skala rumah tangga mulai berkembang di Bali Utara, utamanya untuk bandeng dan kerapu. Peningkatan panti benih skala rumah tangga ini menjadi "multi-species" saat ini sedang dikembangkan. Teknologi pembesaran ikan laut (karang) di keramba jaring apung saat ini sedang dikembangkan dan diharapkan akan segera dikuasai. Teknologi penyediaan pakan untuk ikan laut (karnivora) sedang dikembangkan. Teknologi pengangkutan ikan laut dan krustasea, sudah dikuasai. Teknik pengangkutan hidup tanpa menggunakan air telah dicoba untuk lobster, dan saat ini sedang dikembangkan untuk ikan karang. Teknologi budidaya rumput laut penghasil agar-agar; penanganan dan pengolahannya telah dikuasai dengan baik. Teknologi budidaya untuk jenis lain, rumput laut coklat penghasil alginat, masih akan dilaksanakan.

(3). Pengkayaan Stok.

Teknologi pengkayaan stok (stock enhancement) sudah dikuasai; terdiri dari restocking, perbaikan habitat dengan pembuatan terumbu karang, pengadaan benih untuk restocking, pengaturan pemanfaatan ikan atau organisme yang direstock. Teknologi penangkapan ikan secara bertanggung jawab dengan orientasi pada pengelolaan sumberdaya masih terus dikembangkan. Tercakup dalam teknologi yang masih perlu dikuasai adalah teknologi penangkapan ramah lingkungan dengan selektifitas yang tinggi sehingga tidak membahayakan



sumberdaya dan lingkungan. Pembuatan alat penangkap ikan yang dilengkapi dengan BED (by-catch excluder device) saat ini sedang dikembangkan dan akan segera dimasyarakatkan.

(4). Penanganan Penyakit Ikan.

Vaksin untuk menanggulangi penyakit "Ich" dan Aeromonas pada ikan lele dan mas telah dihasilkan dan digunakan oleh masyarakat, terutama di Jawa Barat. Strain ikan nila GIVT (Genetic Improvement for Tilapia) yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan nila lokal yaitu lebih cepat tumbuh (300-450%), tahan penyakit dan tidak rewel pakan telah dihasilkan dan masih dalam pengembangan lebih lanjut. Untuk pembesaran strain ini, telah dikembangkan sistem keramba jaring apung (KJA) ganda (bertingkat), yaitu pemeliharaan dua atau lebih species ikan yang dirancang sedemikian sehingga ikan di keramba yang lebih dalam dapat memanfaatkan sisa-sisa pakan ikan di keramba di atasnya.

Salah satu kendala terbesar dalam pemeliharaan larva dalam budidaya udang adalah rendahnya laju sintasan ("survival rate") disebabkan oleh serangan berbagai virus. Untuk mengatasinya telah dihasilkan Probiotik Flavimonas BY9. Penggunaan probiotik ini berhasil meningkatkan sintasan larva dan memperpendek lama pemeliharaan. Pendaftaran probiotik ini ke Departemen Kehakiman untuk memperoleh Hak Paten sedang dijajagi.

d. Peternakan

Hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang menonjol diantaranya teknologi pakan, teknologi pembibitan, dan obat ternak.

(1). Teknologi Pakan.

Teknologi pakan yang telah dihasilkan antara lain pemanfaatan bahan pakan lokal dan bahan pakan inkonvensional, pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak melalui aplikasi fermentasi, pemanfaatan pakan suplemen urea mineral molases blok (UMMB), pemanfaatan leguminosa perdu (kaliandra, glirisidia) sebagai sumber protein ternak



ruminansia, dan pemanfaatan casapro atau bahan lain yang sudah direkayasa untuk unggas.

(2). Teknologi Pembibitan.

Beberapa bibit unggul lokal yang sudah siap diaplikasikan antara lain domba prolif, domba komposit dan ayam buras hibrida. Teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada sapi potong merupakan teknik yang dapat dikembangkan dalam rangka penyediaan sapi bakalan lokal (Balok), yang selama ini masih diimpor dari Australia.

(3). Obat Ternak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksin isolat lokal adalah lebih baik didalam pencegahan penyakit di Indonesia, dibanding vaksin impor. Beberapa vaksin lokal yang telah diproduksi oleh Balitvet antara lain vaksin ND, Gumboro, CRD, SE, Infectious Bronchitis (IB), Snot (Coryza), Anthrax, Brucellosis, ETEC, EPEC, Orf, Scabies, dan Haemonchosis. Tanaman obat dan obat tradisional untuk penyakit parasit saluran pencernaan, parasit darah dan dermatitis juga telah dihasilkan.

e. Sumberdaya Lahan dan Agroklimat

(1). Pemetaan dan Pengenderaan jauh.

Peta tanah tingkat tinjau (Skala 1:250.000) seluas 91.736.000 Ha atau 47,8 persen dari luas wilayah Indonesia. Data dan informasi tersebut dapat dipakai untuk perencanaan tingkat regional atau propinsi. Data hasil pemetaan tingkat detail atau semi detail pada beberapa daerah, khususnya daerah-daerah pengembangan transmigrasi dan untuk tujuan-tujuan khusus. Teknologi penginderaan jauh ("Remote Sensing") yang sedang dikembangkan melalui pemanfaatan data digital citra satelit diharapkan luas dan penyebaran lahan bongkor tersebut dapat diketahui secara cepat dan selanjutnya dapat dilakukan rehabilitasinya. Teknologi pendugaan luas areal pertanian melalui teknik Remote Sensing.



(2). Teknologi Pengelolaan Lahan.

Teknologi pengelolaan lahan sawah irigasi yang telah dihasilkan antara lain pengelolaan hara terpadu dengan mengkombinasikan pemanfaatan pupuk anorganik (N, P, K), pupuk organik (jerami), dan pupuk hayati dengan teknik aplikasinya. Teknik konservasi tanah, sistem pertanaman lorong, teras, strip rumput, dll, dan konservasi air (embung, rorak, dll), dan pemupukan (pupuk anorganik, organik maupun pupuk hayati) telah banyak memberikan hasil yang menggembirakan. Sistem pengelolaan tata air, pemupukan dan ameliorasi serta rakitan teknologi sistem usahatani lahan rawa pasang surut juga merupakan teknologi yang telah dihasilkan dibidang tersebut.

f. Sosial Ekonomi Pertanian

Beberapa hasil penelitian sosial ekonomi yang menonjol sebagai bahan pengambilan kebijakan diantaranya adalah:

(1). Konsolidasi Lahan dan Usaha Pertanian

Penelitian yang memadukan data makro (Sensus Pertanian 1983 dan 1993) dan data mikro di tingkat petani (Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung), menunjukkan bahwa secara makro konsolidasi lahan di tingkat petani sudah tampak dengan adanya peningkatan proporsi rumah tangga dengan status lahan garapan, sakah atau sewa. Konsolidasi di tingkat petani didorong oleh adanya fragmentasi lahan dan aksesibilitas pada kegiatan luar pertanian. Konsolidasi di tingkat petani baru memperbaiki salah satu unsur dari aspek penguasaan lahan, yaitu adanya perluasan lahan garapan. Konsolidasi kemitraan agribisnis untuk beberapa komoditi berjalan secara parsial, dan perlu didorong munculnya agribisnis yang bersifat integratif. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa konsolidasi lahan memiliki variasi yang luas tergantung pada jenis komoditas, jenis lahan, tingkat aplikasi teknologi dan orientasi pengembangan produk yang dihasilkan, sehingga perumusan kebijaksanaan tentang masalah ini tidak dapat dibuat seragam.

(2). Perubahan Penguasaan Aset, Tenaga Kerja dan Teknologi di Pedesaan

Penelitian ini merupakan kegiatan berkelanjutan yang mengkaji secara terus menerus beberapa indikator untuk melihat dinamika sosial ekonomi pedesaan. Hasil penelitian dalam kurun waktu 1994-1998 memperlihatkan adanya perubahan tingkat partisipasi rumah tangga dalam pemilikan lahan sawah, dan penurunan rata-rata kepemilikan lahan per rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan tekanan terhadap lahan sawah semakin besar dan penghasilan dari sawah sulit diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Angkatan kerja di pedesaan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, namun karena keterbatasan kapasitas sektor pertanian menyebabkan banyak terjadi pengalihan pekerjaan utama petani menjadi buruh tani dan pekerja di sektor non pertanian. Proses produksi padi di Jawa lebih intensif modal dibandingkan di luar Jawa. Kondisi ini tidak kondusif bagi pemecahan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini. Untuk itu perlu dilakukan restrukturisasi pengembangan proses produksi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

(3). Daya Saing Produk Pertanian Utama di Era Pasar Bebas

Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak dari pemberlakuan kesepakatan GATT/WTO melalui UU No. 7/1994 terhadap komoditi bawang putih, kedelai dan cengkeh di Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedelai memiliki daya saing potensial berdasarkan harga sosial, sementara itu kebijakan nilai tukar yang dianut pemerintah memberikan perlindungan yang kecil terhadap petani kedelai. Untuk bawang putih, petani produsen memperoleh banyak keuntungan dengan adanya pengenaan pajak terhadap konsumen. Rasio sumberdaya domestik menunjukkan bahwa usahatani bawang putih memiliki daya saing komparatif, kecuali yang diusahakan secara monokultur. Penetapan harga impor cengkeh yang jauh di atas harga domestik, menyebabkan kebijakan tarif untuk komoditi ini tidak efektif lagi. Akibat deregulasi tata niaga cengkeh, ada insentif yang cukup nyata bagi petani, dilihat dari pergerakan NPCO dari 0,31 ke 0,51. Beberapa perubahan lingkungan domestik dan global menyebabkan kebijakan tarif tidak efektif lagi terhadap ketiga komoditi di atas.



g. Rekayasa Alat dan Mesin Pertanian

(1). Alsintan Proses Produktif Usahatani

Alat tanam benih sistem tanam langsung (ATABELA 4 rows) ini berfungsi sebagai alat tanam langsung benih padi pada lahan sawah. Alat ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga dan biaya penanaman, mempersingkat waktu tanam, meningkatkan kualitas gabah, dan meningkatkan produksi padi serta nilai tambah. Kapasitas kerja alat tanam padi ATABELA 4 rows ini 10-11 jam per hektar dan kapasitas tanam benih sebesar 55-60 kg per hektar. Untuk komoditas jagung, Alsintan yang telah dihasilkan yaitu alat penyiang tanaman jagung (Weeder). Alat penyiang jagung berfungsi untuk menyiang pada lahan kering untuk tanaman palawija dengan cara mekanis, dengan kapasitas kerja alat ini 40 jam per hektar. Alat lain yang telah dihasilkan yaitu Alat Tanam Jagung RIS-A2M. Alat tanam jagung digunakan untuk menanam benih jagung sistim injeksi pada lahan TOT (Tanpa Olah Tanah) dengan 2 alur tanam.

(2). Alsintan Pasca Panen.

Telah dihasilkan mesin pemanen padi, alsin perontok multiguna, alat pemipil jagung, alat pengering padi dan pengupas kacang tanah. Mesin pemanen padi digunakan untuk memotong dan merebahkan padi secara teratur dalam 4 barisan (1 meter). Kapasitas kerja alat pemanen padi adalah 14 jam per hektar. Alsin Perontok Multicrops berfungsi untuk merontok padi, jagung dan kedelai. Manfaat dari penggunaan mesin ini adalah dapat menurunkan biaya perontokan, menghasilkan nilai tambah (mengurangi susut, mutu hasil lebih baik, dan ongkos lebih murah) sebesar 25-40 persen bila dibandingkan dengan perontokan menggunakan tenaga manusia. Kapasitas kerja alat ini adalah 750 kg/jam untuk padi, 425 kg/jam untuk kedele dan 300 kg/jam untuk jagung. Alat mesin pemipil jagung dirancang khusus untuk memipil jagung tongkol. Keunggulan alsin ini adalah kualitas hasil pipilan baik dan kapasitas kerjanya tinggi, yaitu sebesar 300 kg/jam.

Untuk pengering padi telah dihasilkan dua tipe pengering yaitu tipe DS dan tipe LT-1 BDS. Alat Pengering Padi tipe DS mempunyai 2 kegunaan yaitu : untuk mengeringkan gabah dan



untuk menyimpan gabah/biji-bijian. Kunggulan alat ini adalah proses pengeringan dengan sistem pemanasan tak langsung dan pada kadar air keseimbangan, sehingga tidak menimbulkan aroma asing pada gabah/biji-bijian yang dikeringkan. Mesin Pengering Padi tipe LT-IBDS digunakan untuk mengeringkan dan menyimpan gabah dengan kapasitas 5 ton. Keunggulan mesin ini adalah biaya investasi dan biaya operasi rendah karena menggunakan minyak tanah sebagai sumber panas, dan mutu hasil pengeringan baik. Kapasitas mesin pengering ini sebesar 5 ton gabah.

(3). Alsin Perikanan dan Peternakan

Untuk perikanan alsintan yang telah dihasilkan adalah alat penebar pakan ikan dan alat pengering kista artemia. Alat Penebar Pakan Ikan/Udang Sistem Otomatis berfungsi untuk menebarkan pakan secara merata dengan dosis dan selang waktu tertentu secara otomatis. Kapasitas kerja alat ini adalah 2 ha/jam . Alat Mesin Pengering Kista Artemia. dapat digunakan untuk menurunkan kadar air Kista Artemia basah dari kadar air 68 persen menjadi Kista Artemia kering dengan kadar air 9 persen. Kapasitas kerja alat ini adalah 10 kg Kista Artemia basah.

Alsintan peternakan yang telah dihasilkan adalah pencampur pakan ternak, pencacah hijauan ternak. Alsin Pencacah Hijauan Ternak Mesin yang telah direkayasa mempunyai kapasitas 800-1000 kg/hijauan/jam. Alsin Pencampur Pakan Ternak mempunyai kapasitas operasi 922 kg selama 30 menit. Mesin ini memiliki kemampuan untuk mencampur pakan sehingga terjadi campuran yang homogen.



V. SUMBANGAN PEMIKIRAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

1. Permasalahan dan Tantangan

Selama masa krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung semenjak pertengahan tahun 1997, sektor pertanian muncul sebagai satu-satunya sektor yang dapat bertahan dengan tingkat pertumbuhan yang positif sebesar 0,26 persen, sedangkan sektor-sektor lainnya tumbuh negatif. Sejumlah komoditas pertanian khususnya komoditas ekspor seperti kakao, kopi, udang, dan tuna mengalami boom pada masa krisis ini, karena depresiasi rupiah yang sangat tajam. Sebagai hasilnya, para petani di sejumlah daerah mengalami peningkatan pendapatan yang sangat tajam pula. Meskipun demikian, hal ini sama sekali tidak berarti bahwa secara fundamental sektor pertanian sudah berubah dan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi petani. Oleh karena itu, apabila perekonomian nasional nantinya semakin stabil, dan setelah terjadi penyesuaian harga-harga domestik secara keseluruhan, dampak positif depresiasi rupiah kemudian hilang, dan petani kembali ke kondisi mereka semula.

Apabila kondisi sektor pertanian diamati secara seksama, karakteristik dasarnya sesungguhnya belum jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya yang ditandai dengan berbagai sifat sebagai berikut:

a. Dualisme Pertanian

Pertanian Indonesia saat ini masih ditandai dengan apa yang disebut dualisme, dimana pertanian tradisional yang terdiri dari pertanian rakyat yang masih terbelakang berjalan seiring dengan pertanian modern yang berperilaku dan didukung oleh berbagai institusi modern. Kelompok yang dapat dimasukkan ke dalam kategori pertanian modern adalah usaha perkebunan milik pemerintah dan swasta. Perilaku kelompok ini tidak beda dengan kelompok usaha di sektor ekonomi lainnya, dimana segala kegiatan usahanya didorong sepenuhnya oleh motivasi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dan segala keputusan yang diambil didasarkan atas pertimbangan bisnis.



Interaksi dengan institusi modern lainnya berjalan sangat lancar, bahkan keberhasilan kegiatan kelompok ini sangat ditentukan oleh dukungan sektor ekonomi lainnya, seperti dukungan permodalan dari sektor perbankan dan dukungan pemasaran dari sektor perhubungan.

Pertanian rakyat di lain pihak sejak dahulu sampai sekarang masih tetap merupakan usaha subsisten rumah tangga tani untuk mengamankan kebutuhan pokok khususnya pangan. Interaksi dengan sektor ekonomi lainnya masih sangat terbatas, sedangkan dukungan permodalan dari sektor perbankan sangat terbatas pula. Selama ini dukungan permodalan tersebut dapat dikatakan hanya sebatas dana murah bantuan khusus pemerintah. Inipun tidak seluruhnya dapat dikembalikan, bahkan dua tahun lalu dalam konteks reformasi, pemerintah menghapus bukukan tunggakan kredit usaha tani tidak kurang dari dua ratus milyar rupiah.

b. Lahan Usahatani Sempit

Sensus pertanian tahun 1983 menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan pertanian untuk seluruh Indonesia adalah sebesar 0,98 ha per keluarga tani. Di Jawa rata-rata penguasaan lahan lebih kecil lagi yaitu sebesar 0,58 ha, sedangkan di luar Jawa sebesar 1,58 ha. Penguasaan lahan tersebut cenderung semakin kecil, seperti ditunjukkan oleh hasil sensus tahun 1993 di mana penguasaan lahan secara nasional mengalami penurunan menjadi sebesar 0,83 ha per keluarga tani, sedangkan di Jawa penguasaan lahan secara lebih kecil lagi yaitu diperkirakan hanya sebesar 0,41 ha. Jumlah rumah tangga tani yang memiliki lahan usahatani kurang dari 0,5 ha diperkirakan sebanyak 22 juta rumah tangga.

Dengan lahan usaha 0,5 ha atau bahkan kurang dari itu, berapapun tingkat produktivitas yang dicapai, tidak akan dapat memberikan tingkat pendapatan yang layak. Skala usaha yang tidak memadai tersebut, juga tidak kondusif untuk penerapan teknologi maju, untuk meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu permasalahan utama yang harus dicari jalan penyelesaiannya ialah mengatasi lahan usaha tani yang sangat sempit dan bahkan cenderung semakin sempit tersebut. Akan tetapi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita



dihadapkan pada permasalahan institusi yang sangat pelik dan rumit.

c. Produktivitas dan Mutu Produk Rendah

Produktivitas pertanian rakyat untuk hampir semua komoditas masih jauh dari tingkat produktivitas potensial yang seharusnya dapat dicapai. Produktivitas padi di lahan irigasi misalnya, dengan teknologi pengembangan yang nota bene paling maju dibandingkan dengan teknologi produksi komoditas lainnya, baru mencapai rata-rata produksi sebesar 4,5 ton GKG per ha, masih dibawah produktivitas potensial yang diperkirakan sebesar 7 ton per ha. Selama 20 tahun peningkatan produktivitas di tingkat petani meningkat kurang dari dua kali lipat, yaitu dari 2,5 ton GKG pada tahun 1970an menjadi 4,5 ton per ha GKG pada saat sekarang ini.

Mutu produk yang dihasilkan masih jauh dari baku mutu yang diinginkan konsumen baik domestik maupun internasional. Salah satu contoh nyata dalam hal ini ialah masih sulitnya buah-buahan Indonesia menembus pasar ekspor karena permasalahan lalat buah, bahkan di pasar dalam negeripun buah-buahan lokal hanya mampu mendominasi pasar-pasar tradisional, dan hanya sebagian kecil yang mampu menembus super market di kota-kota besar.

d. Mutu Sumber Daya Manusia Relatif Rendah

Apabila dilihat dari segi kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal pendidikan formal, bagian terbesar petani tidak menyelesaikan pendidikan dasar, bahkan tidak sedikit yang tidak pernah mengesap pendidikan formal sama sekali. Berbagai program sudah dilakukan selama ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan permagangan, akan tetapi dampaknya terhadap peningkatan keterampilan petani masih sangat terbatas. Hal ini secara nyata dapat dilihat dari disiplin petani yang masih rendah dalam menerapkan paket teknologi yang ada khususnya untuk padi. Tingkat aplikasi teknologi bahkan jauh lebih rendah lagi untuk komoditas pertanian lainnya.



e. Aksesibilitas Terhadap Sumber Permodalan Rendah

Akses petani terhadap sumber-sumber modal yang tersedia di sektor formal seperti perbankan masih sangat terbatas. Permasalahan utama yang dihadapi petani pada umumnya dalam hal ini ialah ketidak mampuan memenuhi persyaratan formal yang dipersyaratkan institusi formal tersebut seperti jaminan kredit. Pemerintah selama ini sudah mencoba mendekatkan lembaga-lembaga keuangan formal ke wilayah pedesaan dengan harapan akan mendorong akumulasi modal, tetapi kehadiran lembaga keuangan tersebut kelihatannya belum banyak membawa dampak yang positif terhadap pemenuhan kebutuhan modal. Bahkan sebaliknya kehadiran lembaga keuangan formal dapat berdampak negatif karena modal yang ada di pedesaan justru mengalir ke kota-kota atau wilayah-wilayah lain yang lebih menarik untuk investasi.

f. Kesenjangan Produktivitas

Dalam perekonomian Indonesia, terlihat adanya kesenjangan produktivitas tenaga kerja (ratio antara PDB dengan jumlah tenaga kerja per sektor) antara berbagai sektor. Umpamanya untuk tahun 1996 produktivitas tenaga kerja pertanian adalah Rp 2,33 juta/tenaga kerja. Sementara itu produktivitas tenaga kerja sektor manufaktur mencapai Rp 12,55 juta, konstruksi Rp 1,06 juta, transportasi dan komunikasi Rp 8,96 juta, perdagangan besar dan restoran Rp 5,52 juta serta jasa Rp 2,54 juta. Jadi disamping terjadi kesenjangan produktivitas antar sektor, ternyata produktivitas sektor pertanian adalah paling rendah dibandingkan sektor-sektor utama lainnya.

Rendahnya produktivitas sektor pertanian antara lain disebabkan karena besarnya jumlah tenaga kerja yang ada di pertanian. Pada tahun 1971 jumlah tenaga kerja pertanian mencapai 26,5 juta orang (64,2% tenaga kerja nasional), sedangkan tahun 1997 meningkat menjadi 35,8 juta orang (41,2 %). Hal ini berarti bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar tapi dengan produktivitas yang paling rendah.



2. Peluang dan Potensi Pembangunan Pertanian

Untuk dapat mewujudkan peran strategis sektor pertanian, masih terdapat sejumlah faktor yang merupakan potensi dan peluang meningkatkan pembangunan pertanian, yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan baru, yaitu :

- 1). Masih tersedianya areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti lahan rawa gambut dan pasang surut, serta peningkatan Intensitas Pertanaman (IP), yang masih dapat ditingkatkan serta sumberdaya kelautan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2). Masih terdapatnya kesenjangan antara produktivitas riil di tingkat usaha tani dan produktivitas potensial komoditas pertanian yang besarnya berkisar 20 - 100 persen.
- 3). Kehilangan hasil dan kerusakan pasca panen hasil-hasil pertanian masih cukup tinggi yaitu sekitar 5-15 persen.
- 4). Sebagian besar produk pertanian masih berkualitas rendah yang masih dapat ditingkatkan.
- 5). Penggunaan produk pertanian semakin beragam, tidak saja untuk makanan langsung dan ekspor tetapi juga bahan baku industri dan pakan ternak.
- 6). Pemanfaatan teknologi padat modal dan mekanisasi pertanian yang dapat meningkatkan produksi sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan.

3. Alternatif Kebijakan Atas Beberapa Aspek Pembangunan Pertanian

a. Pertanian Sebagai Leading Sektor

Kebijakan pembangunan nasional selama ini tidak menempatkan sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai sektor unggulan (*leading sector*) yang dapat menghela pembangunan ekonomi nasional. Meskipun dari segi potensi, Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) untuk menjadi negara yang bukan saja dapat berswasembada pangan, tetapi juga dapat menjadi pengekspor utama berbagai produk dan jasa pertanian. Produk-produk tersebut meliputi bahan pangan, papan, sandang (serat), obat-obatan, kosmetika, bioenergy, agrowisata (ekowisata),



dan bahan baku untuk berbagai industri hilir. Sedangkan dari sisi permintaan, seiring dengan pertambahan jumlah dan peningkatan kualitas hidup penduduk dunia, permintaan terhadap berbagai produk dan jasa pertanian tersebut dapat dipastikan akan berlipat ganda di masa-masa yang akan datang.

Sektor pertanian juga dapat menyerap jumlah tenaga kerja paling banyak per satuan usaha dibandingkan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya saat ini diperkirakan masih sekitar 41,2% dari total tenaga kerja Indonesia berada di sektor pertanian. Selain itu karena sektor pertanian memiliki keterkaitan industri hulu dan industri hilir yang kuat serta beragam, maka sektor ini pun dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effects*) yang menjadi tulang punggung dari pembangunan suatu wilayah. Oleh karena sebagian besar kegiatan sektor pertanian berada di wilayah perdesaan dan dikerjakan oleh rakyat banyak, maka sektor pertanian juga dapat membantu mengatasi problema urbanisasi tenaga kurang terdidik/terampil (*unskilled urbanization*) yang selama ini menjadi salah satu permasalahan utama nasional. Dengan demikian, sektor pertanian (dalam arti luas) sesungguhnya merupakan basis ekonomi kerakyatan, baik sekarang ini maupun pada masa-masa yang akan datang.

Apabila pembangunan pertanian, mulai dari sub-sistem produksi, pasca panen (penanganan dan pengolahan hasil), sampai pemasaran dilakukan secara profesional dan berbasis IPTEK, maka keunggulan komparatif yang dimiliki sektor pertanian akan menjelma menjadi sebuah keunggulan kompetitif (*competitive advantages*). Keunggulan kompetitif sektor pertanian tersebut hanya dapat terwujud jika lingkungan bisnis (*business environment*), yang meliputi kebijakan fiskal dan moneter, prasarana dan sarana, sistem hukum dan kelembagaan, dan sumberdaya manusia dan IPTEK, bersifat kondusif bagi tumbuh-suburnya usaha pertanian secara efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi dapat diciptakan.

b. Mengatasi Kegagalan Pasar (Market Failure)

Peranan pemerintah masih sangat diperlukan apabila terjadi kegagalan pasar. Hal ini disebabkan karena pihak swasta tidak mungkin mengatasi masalah kegagalan pasar mengingat misi pihak swasta adalah “profit oriented”. Berikut adalah beberapa kegagalan pasar yang perlu ditangani pemerintah:



Sisi Input :

- Mengendalikan pemakaian pestisida yang dapat merusak lingkungan.
- Mengatasi kelangkaan pupuk terutama pupuk urea.
- Menyediakan kredit bagi petani, karena pada umumnya Bank komersial enggan membiayai usaha pertanian yang dianggap memiliki resiko yang tinggi.
- Menyediakan benih/bibit pertanian.
- Mengembangkan teknologi dan penyuluhan pertanian
- Membangun irigasi dan water management .
- Melaksanakan soil conservation.

Sisi Output:

- Memelihara dan mengelola stok beras nasional untuk stabilisasi harga di tingkat produser dan konsumen.
- Menjaga kestabilan harga beras sekitar pita harga (middle price). Pita harga tersebut harus cukup besar untuk merangsang pihak swasta (private storage) untuk dapat menutup bunga kredit bank sebesar 5% per bulan selama 4 sampai 5 bulan. Kalau harga beras di pasar berada dibawah pita harga, pemerintah akan melakukan operasi pasar dengan membeli beras langsung dari pasar/petani untuk mengangkat harga beras kembali ke pita harga, sebaliknya pemerintah harus menjual beras ke pasar jika harga pasar berada di atas pita harga.

c. Pendekatan Agribisnis

Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan agribisnis dan agroindustri secara komprehensif serta terpadu. Secara hakiki, pendekatan ini mengandung arti bahwa sistem produksi, pasca panen (penanganan dan pengolahan), dan distribusi pertanian harus secara produktif dan efisien dapat menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Produk-produk pertanian baik dalam arti kuantitas maupun kualitas hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga permasalahan “market glut” (harga turun drastis pada saat terjadi panen raya) yang sampai



saat ini masih merupakan dilema klasik sektor pertanian dapat dihindari. Untuk dapat menghasilkan berbagai produk pertanian dengan nilai tambah dan daya saing yang tinggi, diperlukan penerapan IPTEK dengan manajemen yang profesional melalui pendekatan QCD (Quality, Cost and Delivery) pada keseluruhan mata rantai (sistem) agribisnis, mulai dari aspek produksi, pasca panen, transportasi dan distribusi, sampai ke pemasaran. Mengingat bahwa kesinambungan (sustainability) dan pembangunan agribisnis dan agroindustri bergantung pada daya dukung dan kualitas lingkungan, maka pelaksanaannya harus sesuai azas-azas kelestarian lingkungan. Dalam hal daya saing di pasar internasional, proses produksi pertanian yang dijalankan secara ramah lingkungan menjadi sangat penting, karena sekarang dan terlebih dimasa mendatang (saat era perdagangan bebas berlaku penuh), setiap produk pertanian harus mengikuti persyaratan lingkungan, seperti ISO 14000, ecolabelling, HACCP, responsible fishery, dan lainnya.

Agar keberhasilan agribisnis dapat berkesinambungan (sustainable), maka sistem pembangunan pertanian harus memperhatikan empat faktor utama yaitu produktivitas, efisiensi, kualitas, dan nilai tambah. Oleh karena itu, agribisnis tidak berhenti pada produksi komoditas primer, tapi sampai ke hilir yaitu kegiatan yang menghasilkan nilai tambah, yang berarti menumbuhkan sektor industri manufaktur produk hasil pertanian dan jasa (value added manufacturing and service industries). Dengan demikian daya saing yang tinggi dari produk agribisnis dan agroindustri Indonesia dapat dijamin sepanjang masa. Pengalaman empiris negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Australia dan New Zealand dengan agribisnis dan agroindustri yang kuat dari hulu sampai ke hilir, menunjukkan bahwa pembangunan nasional yang sukses harus berbasis pada sumberdaya alam, sehingga mereka selalu mengatakan "from the farm to the kitchen, from the staple to the table". Multinational corporation berbasis pertanian yang merajai dunia seperti Monsanto, Pioneer hybrid, Kellogg, Unilever, General Foods, McDonald, Pizza HUT, dan sebagainya, semuanya berbasis pertanian.

Guna menjamin keberhasilan strategi pembangunan nasional Indonesia harus berbasis pada pertanian yang komprehensif dengan membenahi tidak saja di sektor budidaya, tetapi juga di



hulu yang meliputi industri benih, pupuk, obat-obatan, lahan, air dan mekanisasi. Sedangkan aspek hilir mencakup manufaktur produk hasil pertanian, alat pengolahan, penyimpanan, transportasi, distribusi dan konsumsi/gizi. Dengan pendekatan ini, pembangunan pertanian akan berkelanjutan. Untuk ini diperlukan strategi bersama dan upaya bersama dari semua sector, semua lapisan masyarakat dan pihak pemerintah, serta perguruan tinggi agar mampu memainkan peran yang instrumental dalam proses ini.

Keberhasilan pengembangan agribisnis membuat adanya iklim yang kondusif, oleh karena itu, dalam rangka pengembangan agribisnis, beberapa hal berikut perlu mendapat perhatian khusus.

(1). Perbaikan Lingkungan Agribisnis

Lingkungan eksternal (business environment) atau kebijakan ekonomi makro seyogyanya dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat kondusif bagi kemajuan agribisnis dan agroindustri. Sistem perbankan yang ada sekarang yaitu, “branch banking system”, kurang mendukung perkembangan agribisnis dan agroindustri bahkan bersifat predatorik terhadap sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena orientasi utama sistem yang ada adalah perdagangan, sehingga sekitar 70% dari total dana yang terkumpul oleh bank-bank cabang di daerah (lokasi usaha pertanian) kembali ke bank di Jakarta (pusat kota lainnya). Disamping itu, suku bunga untuk usaha agribisnis dan agroindustri seharusnya mengikuti negara-negara lain, seperti Malaysia (9%) Thailand (7%), dan Australia (3%).

(2). Peningkatan Peran Kelembagaan

Untuk mewujudkan sistem pertanian dengan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing tinggi, diperlukan lembaga pertanian yang mampu mendinamisasikan seluruh pelaku pertanian dalam melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan pertanian, serta mampu menjadi dinamisator dan katalisator bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.



Selain itu, pengembangan kelembagaan pertanian memerlukan rekayasa sosial yang menyangkut peran koperasi, sehingga pada akhirnya dapat menjelma menjadi “collective farming”. Di samping itu untuk dapat mewujudkan pertanian yang komersial, percepatan pembangunan koperasi agribisnis perlu dilaksanakan sebagai integrasi vertikal dan horizontal pengembangan agribisnis.

(3). Pengembangan Model Pembangunan Wilayah Berbasis Agribisnis

Untuk mengakselerasi pembangunan pertanian melalui pendekatan agribisnis dan agroindustri seperti dicita-citakan, perlu dibangun percontohan-percontohan (working models) pembangunan pertanian melalui pendekatan agribisnis dan agroindustri secara komprehensif dan terpadu di setiap propinsi. Penerapan model tersebut dapat dilakukan pada satu Daerah Tingkat II atau Kapet (Kawasan Pembangunan Terpadu) yang ada pada setiap propinsi.

d. Perencanaan Yang Mengacu Pada Perilaku Pasar

Strategi pembangunan pertanian pada era globalisasi ini hendaknya tetap berpedoman pada berfungsinya sistem dan mekanisme pasar secara sehat, dan kelembagaan yang ada. Operasionalisasi dari strategi ini jelas sangat luas karena dihadapkan pada gejala umum dan siklus rutin harga komoditas pertanian yang biasanya sangat tinggi pada musim paceklik, karena permintaan tinggi dan atau karena sedikitnya persediaan. Harga yang tinggi ini seringkali diantisipasi secara salah oleh para petani sehingga mereka berbondong-bondong mengusahakan komoditas yang diperkirakan akan menguntungkan tersebut tanpa memikirkan jumlah yang bisa diserap pasar.

Ide dasar dari strategi tegaknya mekanisme pasar dan bekerjanya sistem kelembagaan adalah pembangunan pertanian yang berbasis kemasyarakatan (“community based development”), sebagai alternatif dari pembangunan pertanian yang semata berbasis komoditas (commodity based development). Strategi ini dikenal dengan pendekatan keterkaitan desa-kota (rural diriven planning). Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi



untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota di atas sebagai berikut:

Pertama, pemanfaatan dan pengembangan institusi ekonomi rakyat yang mandiri. Saat ini sudah dikembangkan konsep Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Inti atau KMI pada suatu lokasi pusat jaringan kerja. Lembaga ini kelak diharapkan akan berfungsi sebagai mata rantai utama dalam pemberdayaan jaringan kerja antar lembaga ekonomi rakyat dalam suatu wilayah administrasi, serta pemberdayaan antar kelompok tani yang berada dalam wilayah kerja ekonomi rakyat berbasis agribisnis itu.

Kedua, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pembangunan yang memadai, seperti jalan desa dan jalan usahatani, sarana pengairan/irigasi untuk daerah yang memiliki sumber daya air, dan sarana drainase untuk areal pertanian yang baru dibuka dan berasal dari reklamasi rawa dan tanah gambut, dan sarana lain yang memadai pada daerah yang menggunakan sistem sorjan dan pola pertanian pasang surut.

Ketiga, pembangunan perangkat lunak yang mencakup pengembangan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu program pengadaan, pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) di bidang non-pangan merupakan keniscayaan. Hal ini sangat penting mengingat selama ini masih terkesan bahwa para petugas lapangan, sebagai ujung tombak terakhir hanya mengetahui dan mendalami aspek padi dan perberasan saja, sedangkan kondisi saat ini menuntut pemahaman mereka yang lebih luas yaitu mencakup pembangunan pertanian dan agribisnis secara umum.

e. Desentralisasi

Strategi pengembangan pertanian pada waktu yang akan datang akan sangat dipengaruhi oleh desentralisasi berbagai aspek pemerintahan yang sedang digulirkan pemerintah sekarang ini akibat tuntutan reformasi, dan pengaruh globalisasi yang membawa serta transparansi dan demokratisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada daerah khususnya Kabupaten dan Kota untuk *mengatur dan mengurus*



kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk kegiatan pertanian. Dengan demikian peran dan fungsi pusat yang sangat dominan dalam hampir segala hal selama ini, akibat sentralisasi pemerintahan, harus dirancang ulang secara keseluruhannya. Pendekatan penetapan target-target nasional yang ditetapkan dari pusat selama ini, tidak tepat lagi untuk digunakan, karena undang-undang menjamin kebebasan seluas-luasnya kepada Kabupaten/Kota untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan kondisi riil sumberdaya yang ada di masing-masing wilayah.

Dalam konteks otonomisasi daerah, strategi pembangunan pertanian pada waktu yang akan datang harus membuka peluang bagi keragaman pola pembangunan pertanian, keragaman tingkat kemajuan, dan kecepatan pembangunan pertanian di wilayah. Dengan kondisi sumberdaya yang sangat beragam dan berbeda antar wilayah, fokus dan prioritas pembangunan pertanian antar wilayah akan sangat berbeda pula. Kawasan Timur Indonesia misalnya akan cenderung memberi perhatian yang lebih besar pada pengembangan peternakan dan perikanan sesuai dengan kondisi sumberdaya yang tersedia di wilayah tersebut, wilayah Jawa kelihatannya akan cenderung pada pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan Sumatera dan Kalimantan akan lebih cenderung terkonsentrasi pada pengembangan komoditas perkebunan.

f. Konsolidasi Lahan

Salah satu kendala untuk membangun sektor pertanian menjadi sektor andalan adalah masalah lahan. Seringkali dikatakan bahwa masalah lahan ini merupakan masalah yang paling rumit karena menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, demografi, hukum, politik dan sosial. Adapun permasalahan lahan yang dihadapi selama ini antara lain adalah penguasaan lahan yang semakin sempit, konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian, dan masih terdapatnya lahan tidur yang cukup luas di wilayah-wilayah tertentu.

Berikut adalah beberapa pemikiran untuk memecahkan permasalahan dalam hal penguasaan lahan pada waktu yang akan datang yaitu:



(1). Corporate Farm

Untuk mengatasi masalah penguasaan lahan sempit terutama di Jawa, konsolidasi lahan yang mengarah pada "corporate farming", merupakan alternatif pemecahan yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, suatu hamparan lahan pertanian yang diusahakan atau dikuasai oleh sejumlah petani kecil, pengusahaannya dikonsolidasikan menjadi satu usaha tani bersama atau "corporate farming". Lahan pertanian yang lama secara fisik ditata kembali sehingga lebih memudahkan untuk pemanfaatan alat-mesin pertanian, mengatur irigasi dan drainase. Dengan demikian pada struktur yang baru bentuk dan letak lahan masing-masing petani yang lama tidak kelihatan lagi, namun setiap petani masih menjadi pemilik dan tetap mempunyai hak atas lahan, dengan luas areal yang sama. Sebagai bukti kepemilikan lahan, petani diberikan sertifikat tanda kepemilikan dengan luas yang semula dimilikinya yang tergambar dalam peta lahan "corporate farm". Pemilik sertifikat setiap waktu panen dapat mengklaim hasil panen sesuai dengan luas kepemilikannya. Sertifikat ini dapat diwariskan maupun diperjual belikan.

(2). Perluasan Areal Garapan

Secara teknis di luar Jawa dimana perluasan penguasaan lahan masih dimungkinkan, namun sulit dilaksanakan karena keterbatasan modal investasi (membeli lahan) para petani. Alternatif pemecahannya adalah dengan sistem perluasan areal garap secara bertahap. Petani yang berkeinginan untuk memperluas lahan garapannya namun kekurangan modal investasi, diberikan tambahan lahan (oleh negara) sesuai dengan kemampuan garapannya. Pada tahap awal selama belum mampu membayar harga lahan, petani dapat mengusahakan lahan tambahan tersebut dalam bentuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai. Pemberian Hak Guna Usaha dan Hak Pakai dapat dikenakan fee atau pajak tahunan yang wajar. Pada tahap selanjutnya bila sudah mampu dan bila dimungkinkan petani dapat membeli lahan tambahan tersebut sehingga menjadi hak milik. Sementara itu untuk menambah kemampuan petani menggarap lahan, perlu dikembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alat mesin pertanian (UPJA), serta kredit usaha tani.



(3). Hak Guna Usaha (HGU) Skala Kecil dan Menengah

Banyaknya lahan tidur yang dikuasai oleh pengusaha besar saat ini sudah saatnya untuk ditinjau dan ditata kembali kedudukannya. Penguasaan lahan tidur tersebut akan lebih baik bila diberikan kepada pengusaha profesional kecil dan menengah yang ingin bergerak di sektor pertanian/ agribisnis dengan pemberian Hak Guna Usaha agar mencapai skala usaha ekonomis. Untuk mencegah terjadinya lahan tidur kembali, maka pemberian Hak Guna Usaha dibatasi luasnya, misalnya maksimum 50 hektar untuk skala kecil dan 500 hektare untuk skala menengah. Luas areal yang optimal untuk skala kecil dan menengah perlu dikaji lebih lanjut, karena sangat tergantung dari jenis komoditi yang akan diusahakan. Terhadap lahan yang terkena HGU ini dapat dikenakan "fee" atau pajak yang wajar, untuk menambah pendapatan negara/daerah. Besarnya "fee" didasarkan pada komoditi yang diusahakan, letak lokasi, keadaan infrastruktur, dan lain-lain.

(4). Dukungan Lintas Sektor

Kerberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh dukungan sektor-sektor terkait dalam hal pembangunan infrastruktur, permodalan dan kelembagaan. Sarana transportasi seperti jalan usahatani dan jalan desa mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung kemajuan sektor pertanian. Dari sisi produksi, faktor jalan dan transportasi yang efisien akan dapat memperlancar arus lalu lintas faktor-faktor produksi yang digunakan, sedangkan dari sisi pemasaran akan turut mempengaruhi harga produksi. Demikian pula bagi calon investor sarana transportasi yang memadai dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya diwilayah yang bersangkutan.

Pertanian sampai saat ini masih relatif kurang diminati dunia usaha antara lain karena suku bunga perbankan yang dirasakan terlalu tinggi untuk usaha tani di pedesaan yang mempunyai resiko tinggi. Oleh karena itu untuk merangsang permodalan bagi pembangunan pertanian perlu dikembangkan lembaga keuangan pedesaan seperti lumbung desa dan bank desa yang dapat memberikan kredit murah untuk kredit alat-alat pertanian, kredit usaha-usaha pertanian dan kredit pemasaran untuk menjamin pemasaran hasil-hasil pertanian.



4. Fokus Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian pada waktu yang akan datang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks, karena perubahan lingkungan domestik, regional dan global yang sangat dinamis. Berhadapan dengan kondisi demikian, agar dapat memainkan strategisnya, pembangunan pertanian pada waktu yang akan datang perlu difokuskan pada tiga hal pokok berikut : Peningkatan ketahanan pangan, Pengembangan ekonomi rakyat (petani, peternak, nelayan), dan Peningkatan ekspor dan substitusi impor.

a. Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya bahan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu untuk menopang aktivitas sehari-harinya sepanjang waktu pada harga yang terjangkau. Dengan demikian, dalam pengertian kebijakan operasional, ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan) dan stabilitas pengadaannya. Peningkatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar, kualitas pangan yang dikonsumsi akan menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa, keterkaitan pangan kedepan dan kebelakang dalam pertumbuhan ekonomi nasional sangat tinggi, dan ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang erat pada ketahanan nasional.

Dari sisi pasokan atau produksi, fokus upaya pencapaian ketahanan pangan dilaksanakan dalam bentuk:

- Peningkatan produksi beras untuk meraih kembali swasembada beras secara nasional.
- Peningkatan produksi komoditas palawija, khususnya jagung dan kedelai guna mendukung pengembangan industri pakan domestik dan pengolahan pangan sumber protein nabati.
- Peningkatan produksi perikanan, peternakan dan hortikultura utama untuk meningkatkan keanekaragaman, keseimbangan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

- Peningkatan pengembangan pangan lokal di masing-masing wilayah dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengolahan pangan untuk mempercepat proses diversifikasi konsumsi pangan.

Keseluruhan fokus kegiatan di atas diupayakan dengan memberdayakan para petani, peternak dan nelayan agar mampu mengembangkan usahataniannya, melalui upaya pengembangan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian, memfasilitasi pengadaan sarana produksi dan modal kerja, perumusan kebijakan harga dan insentif berproduksi agar mampu berproduksi secara efisien, dan mendorong percepatan diversifikasi pangan ke arah non beras dan peningkatan kualitas konsumsi gizi.

b. Pengembangan Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan

Pengembangan ekonomi rakyat sektor pertanian, yaitu petani, peternak dan nelayan mempunyai justifikasi yang sangat kuat.

Pertama, para pelaku ekonomi pertanian adalah para pengusaha skala kecil dengan basis ekonomi rakyat, yang tersebar berjuta-juta usaha di seluruh Wilayah Nusantara. Usaha pertanian skala kecil ini secara Individu seringkali dicirikan oleh inefisiensi dalam pengelolaan faktor produksi, lemah dalam permodalan, dan kurang mampu dalam menjangkau pelayanan yang disediakan pemerintah atau dunia usaha. Di pihak lain, usaha kecil pertanian merupakan penopang ekonomi pedesaan dan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan.

Kedua, sektor pertanian Indonesia yang sebagian besar ditopang usaha kecil dan menengah telah terbukti mempunyai daya tahan yang sangat lentur dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi beberapa kali, pada dekade 1960an, 1970an dan 1990an. Faktor utama yang menopang ketahanan pertanian ini karena sektor ini didukung oleh kekayaan sumberdaya domestik, yang menciptakan struktur biaya produksi dengan kandungan sumberdaya domestik/lokal yang tinggi.

Ketiga, pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan kehendak rakyat yang diformulasikan dalam Ketetapan MPR No. XV/1998. Dalam Ketetapan MPR tersebut dikemukakan bahwa



prioritas dukungan diberikan kepada pengusaha ekonomi lemah dan pengelolaan sumberdaya alam diberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan ekonomi petani, peternak dan nelayan diantaranya adalah:

- Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha pertanian tidak hanya terbatas pada aspek produksi (budidaya), tetapi juga pada aspek agribisnis secara keseluruhan, termasuk ketrampilan manajerial, melalui penyuluhan dan pengkajian teknologi spesifik lokasi,
- Mengembangkan kemampuan petani untuk bekerjasama dalam bentuk kelompok tani maupun koperasi pertanian,
- Mengembangkan sistem pemasaran yang efisien dan praktek bisnis yang berorientasi pasar, mengembangkan kelembagaan informasi pertanian, dan membina pengembangan mutu produk,
- Mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/pengusaha kecil dengan pelaku usaha menengah dan besar untuk mewujudkan demokrasi ekonomi,
- Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi dalam penerimaan pengembangan usaha pertanian skala kecil, modal kerja, pengadaan sarana produksi, maupun kebijakan lainnya untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat.

c. Peningkatan Ekspor dan Substitusi Impor

Salah satu peran penting pertanian adalah sumbangannya dalam penerimaan ekspor dan penghematan devisa. Peran ini perlu terus dilanjutkan dengan mengacu pada kondisi perdagangan Internasional yang telah diliberalisasikan melalui berbagai kesepakatan, baik multilateral, regional maupun bilateral, seperti WTO, AFTA dan kerja sama perdagangan bilateral antar negara.

Potensi pertanian dalam arti luas cukup besar dalam upaya peningkatan ekspor, yaitu dari sub sektor perkebunan dan perikanan. Beberapa komoditas peternakan dan hortikultura juga mempunyai prospek ekspor yang baik. Untuk mendorong pengembangan ekspor hasil-hasil pertanian melalui program-



program pembangunan pertanian dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- memfasilitasi kegiatan promosi investasi, perdagangan dan ekspor di berbagai wilayah,
- meningkatkan kemampuan para petani, petemak dan nelayan serta pengusaha pertanian dalam menghasilkan produk-produk pertanian untuk ekspor, terutama dalam pengembangan produk, penerapan standar mutu, dan perbaikan mutu produk agar sesuai dengan permintaan berbagai pasar ekspor, termasuk penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan
- penyediaan pelayanan Informasi pasar dan pemasaran, termasuk informasi mengenai harga dan prospek pasar, serta pengembangan terminal agribisnis,
- mengidentifikasi peluang-peluang investasi di bidang agribisnis, khususnya yang mempunyai prospek usaha untuk ekspor yang cukup baik.

5. Hal-hal Yang Memerlukan Perhatian Khusus

a. Program SPL-OECF Sektor Pertanian

Sektor Program Loan OECF Sektor Pertanian merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan serta menderita rawan pangan. SPL Sektor Pertanian dan Kehutanan ini mencakup lima subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura; Peternakan; Perikanan; Kehutanan dan Perkebunan. Program SPL ini berlaku efektif selama dua tahun yaitu sejak Loan Agreement ditanda tangani bulan Oktober 1998 untuk INP-22 dan bulan Desember untuk INP-23.

Proyek OECF AF-SPL (sektor pertanian) meliputi 6 sub-program, yaitu:

INP-22

- 1) Sub-Program Food Crop Production Development (FCPD):
Rp 1.460 milyar.



- 2) Sub-Program Development of Fishing Port (DOFP):
Rp 235,26 milyar

INP-23

- 1) Sub-Program Rehabilitation of Brackish Water Shrimp Culture Infrastructure Development (RSCI): Rp 77,33 milyar
- 2) Sub-Program Government's Shrimp and Fish Hatcheries Improvement (GSFHI): Rp 22,19 milyar
- 3) Sub-Program Infrastructure Development for Poultry Rural Rearing Multiplication Center (RRMC): Rp 73,73 milyar (Tahun I)
- 4) Sub-Program Development of Livestock Marketing and Slaughterhouse (DLMS): Rp 24,49 milyar (Tahun I)

Kegiatan Utama Program SPL-OECF di Sektor Pertanian adalah :

- 1) Meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai melalui peningkatan intensitas pertanian dengan melaksanakan: (a) rehabilitasi fasilitas irigasi, (b) pembangunan jalan usaha tani, (c) penguatan kelembagaan pendukung pertanian, (d) pengadaan sarana mobilisasi bagi penyuluh dan petugas lapang pertanian, (e) pengadaan alat dan mesin pertanian, (f) konsultan manajemen dan monitoring, (g) kegiatan pendampingan/penyuluhan.
- 2) Meningkatkan produksi hasil penangkapan ikan di laut untuk pemenuhan konsumsi lokal dan peningkatan ekspor; meningkatkan pendapatan petani/nelayan dan menyerap tenaga kerja melalui pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan dan pusat pendaratan ikan, rehabilitasi saluran irigasi tambak, dan pengembangan perbenihan ikan dan udang.
- 3) Meningkatkan produksi ayam buras melalui pengembangan perbibitan dan budidaya ayam buras secara terpadu di dalam satu kawasan serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menghasilkan daging berkualitas yang aman, sehat dan utuh, serta meningkatkan efisiensi dalam pemasaran produksi daging.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program SPL-OECF khususnya untuk sub program tanaman pangan adalah ditundanya untuk sementara pelaksanaan kegiatan



program tersebut sambil menunggu penjelasan tentang adanya perbedaan antara kegiatan yang ada dalam DIP dan yang ada dalam dokumen perjanjian (MOU) antara lain:

- a. Terdapat kegiatan yang pada rencana semula tercantum dalam MOU tetapi di dalam DIP/PO tidak tercantum.
- b. Terdapat kegiatan yang pada rencana semula tidak ada dalam MOU tetapi ada dalam DIP/PO.
- c. Jumlah item/kegiatan fisik berbeda antara MOU dengan DIP/PO.

Untuk menangani masalah tersebut, beberapa langkah penting sudah diambil oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan melakukan berbagai penyempurnaan perencanaan serta berkonsultasi secara intensif dengan perwakilan SPL – OECF, Jakarta. Berhubung proyek ini melibatkan jumlah dana yang sangat besar dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif singkat, pelaksanaan kegiatan ini perlu mendapat perhatian khusus agar dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

b. Upaya Khusus Peningkatan Produksi Daging Sapi

Upaya ini dilatar belakangi oleh perkembangan impor ternak sapi bakalan dan daging yang cenderung meningkat setiap tahunnya terutama sebelum krisis moneter. Peningkatan ini diakibatkan adanya permintaan masyarakat terhadap daging yang terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita.

Untuk dapat mencapai produksi daging pada tingkat permintaan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2005, diperlukan upaya-upaya khusus sebagai berikut :

- Peningkatan produktivitas melalui :
 - ♦ Peningkatan kegiatan IB secara terpadu dan terkonsentrasi diikuti dengan program penggemukan.
 - ♦ Upaya-upaya persilangan ternak kearah dual purpose (dwi-guna).
 - ♦ Pengembangan sentra baru melalui pola kawasan peternakan.
 - ♦ Desentralisasi pelaksanaan dan produksi semen untuk IB.



- Peningkatan populasi ternak melalui :
 - ♦ Pengendalian pemotongan betina produktif.
 - ♦ Pengendalian penyakit reproduksi pada ternak besar (Brucellosis).
 - ♦ Impor bibit ternak, apabila diperlukan.
- Diversifikasi produk melalui :
Substitusi daging ternak besar dengan daging ternak lainnya.
- Aspek kelembagaan :
 - ♦ Secara konsisten memperbaiki kinerja UPT bibit ke arah komersialisasi dan privatisasi, sehingga UPT bibit dapat menghasilkan bibit yang berkualitas.
 - ♦ Mengembangkan kelembagaan penangkar bibit rakyat (dilaksanakan oleh rakyat sendiri) semacam Village Breeding Center (VBC).

c. Upaya Privatisasi Unit Pelaksana Teknis.

Pada dasarnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian merupakan kepanjangan tangan unit kerja lingkup Departemen Pertanian yang menangani sebagian tugas pokok dan fungsi pembangunan pertanian. Dalam rangka pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam kegiatan pembangunan seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 22, UPT yang ada sedang dalam proses privatisasi. Masalah mendasar yang perlu diatasi dalam rangka privatisasi tersebut ialah meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajerial petugas dalam mengelola sumberdaya secara efisien, sehingga dapat menghasilkan mutu produk/jasa pelayanan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta terhadap penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya privatisasi. Unit kerja yang telah memulai proses privatisasi ini adalah Direktorat Jenderal Peternakan.

d. Keberlanjutan dan Penyempurnaan KUT

Untuk mendukung pelestarian swasembada pangan dan peningkatan pendapatan petani maka dukungan pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT) masih tetap diperlukan. Dengan



terbitnya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999 tentang kerja sama Antar Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut telah diterbitkan beberapa kebijakan KUT – TP.1999/2000, diantaranya :

- 1) Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor : S-70/M.Ekuin/09/99 tanggal 23 September 1999 perihal Persiapan KUT MT. 1999/2000.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/99 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 487/KM.017/99 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program.
- 4) Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 1081/KPTS/BM.530/10/1999
20/SKB/M/X/1999
Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit usaha Tani.
- 5) Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 09/KPTS/BM.530/10/1999
21/SKB/M/X/1999
Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Kredit usaha Tani.
- 6) Perjanjian kerja sama antara Pemerintah cq. Menteri Keuangan dengan masing – masing Bank Pelaksana, tanggal 13 Oktober 1999.
- 7) Petunjuk Bersama Sesdal Bimas dengan Direktur Jenderal Bina Koperasi tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Tani.
- 8) Surat Edaran Masing – Masing Bank Pelaksana.

Beberapa prinsip pelaksanaan KUT TP. 1999/2000 yang merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya, antara lain:



- 1) Dalam hal pendanaan KUT, kalau TP yang lalu berasal dari KLBI maka untuk TP. 1999/2000 ada peran serta Bank Pelaksana/Bank Umum untuk menyediakan dana. Disamping itu dana dari pemerintah baik untuk tambahan penyediaan dana KUT maupun untuk subsidi bunga.
- 2) Potensi penyaluran KUT sangat berkaitan erat dengan potensi pengembalian KUT TP. sebelumnya dengan mengacu kepada Cash Flow Area dan nilai kreditnya. Cash flow ini akan menjadi pedoman penyediaan dana dan bahan monitoring setiap bulannya.
- 3) Dalam pemberian persetujuan KUT oleh Kakandepkop, sebelum Kakandepkop memberi persetujuan KUT yang diajukan oleh Koperasi/LSM perlu diteliti kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat oleh Satuan Pelaksana Bimas setempat atau yang ditugaskan Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota.
- 4) Kelompok tani yang menyusun RDKK dan mengajukan permohonan KUT adalah kelompok tani Hambaran yang telah dikukuhkan dan didaftar pada Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota setempat dan telah menjadi wilayah binaan (Wilbin) PPL.
- 5) Koperasi dan LSM sebagai pelaksana penyalur KUT adalah Koperasi/LSM setempat yang mendapat rekomendasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota setempat.
- 6) Imbalan fee untuk PPL sebesar 1 % adalah termasuk untuk Sekretariat Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Sekretariat satuan Penggerak Bimas Desa dengan dirinci 0,5 % untuk PPL, 0,2 % Set Satgrak Kec. Dan 0,3 % untuk Satgrak Desa.
- 7) Imbalan fee untuk Koperasi/LSM sebesar 5 % dirinci lebih lanjut untuk operasional Koperasi/LSM sebesar 2,5 % Kelompok tani Hambaran 0,5 % Margin Koperasi/LSM 1,0 % dan biaya operasional koordinasi pembinaan dan pengendalian oleh Tim Kredit Usaha Tani Tingkat Pusat, Propinsidan Kabupaten sebesar 1 %.

Mengingat pentingnya ketersediaan dana bagi petani untuk pembiayaan usaha taninya bagi penerapan teknologi yang sesuai dengan anjuran, maka keberlanjutan penyediaan KUT ini menjadi sangat penting dan perlu terus diupayakan secara tepat jumlah, waktu, dan penerimanya.



e. Penyediaan Kredit Usaha Perikanan dan Peternakan

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan usaha perikanan adalah keterbatasan modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah sejak tahun tujuh puluhan telah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi berupa pemberian fasilitas kredit, baik kredit program maupun non program, seperti kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), akan tetapi pemanfaatan kredit tersebut sampai saat ini masih sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan karena keterlambatan Bank Pelaksana dalam melaksanakan pembinaan terhadap KUD baru dan pengajuan ke Bank Indonesia.

Sehubungan dengan itu telah diusulkan skim kredit yang sesuai dengan karakteristik usaha perikanan yakni Kredit Usaha Perikanan Rakyat (KUPR) dan Kredit Usaha Tani (KUT) Intensifikasi Pembudidayaan Ikan. Realisasi skim kredit tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan usaha perikanan rakyat pada waktu yang akan datang.

f. Pemberdayaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Dalam rangka rangka lebih memantapkan kegiatan penelitian pada waktu yang akan datang, beberapa hal berikut perlu mendapat perhatian khusus :

- 1). Pengaturan Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian. Kegiatan pengaturan keamanan hayati dan keamanan pangan produk pertanian hasil rekayasa genetik yang telah dilaksanakan adalah : (a) Penyusunan tinjauan ilmiah keamanan pangan produk rekayasa genetik, dan (b) Penerbitan Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik, serta pembentukan Komisi Keamanan dan Keamanan Pangan. Kegiatan yang masih perlu dilanjutkan pada waktu yang akan datang meliputi : (a) Penyusunan protocol pengujian keamanan pangan produk pertanian hasil rekayasa genetik, (b) Sosialisasi keamanan hayati, (c) Sosialisasi keamanan pangan, (d) Pembentukan Tim Teknis Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan.



- 2). Jaringan Penelitian Pertanian. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan kemampuan dalam menghadapi kebutuhan akan teknologi yang semakin meningkat dan kompleks, serta keragaman agroekosistem dan potensi wilayah, maka diperlukan suatu Jaringan Penelitian Pertanian (JPP) yang melibatkan lembaga penelitian dan instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta.
- 3). Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Penelitian Pertanian di Wilayah. Produktivitas dan kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana penelitian. Dalam kaitan ini permasalahan tenaga peneliti di unit kerja litbang di wilayah meliputi : tingkat pendidikan dan kemampuan profesional masih belum memadai, jumlah dan komposisi belum berimbang baik antar disiplin ilmu maupun penyebaran antar wilayah. Untuk mendukung peningkatan kemampuan penelitian di wilayah, maka program pengembangan tenaga peneliti di wilayah yang telah berlangsung selama ini perlu dilanjutkan, baik melalui pengadaan, pembinaan, pendidikan dan latihan serta pembinaan karier.

g. Penanganan Pengungsi Timor-Timur di Nusa Tenggara Timur

Kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur telah mengakibatkan mengalirnya pengungsi asal Timor-Timur yang saat ini berjumlah kurang lebih 240.000 jiwa ke Nusa Tenggara Timur. Hal ini selain sangat memberatkan daerah juga sangat memprihatinkan kehidupan dan penghidupan para pengungsi itu sendiri, oleh karena itu diperlukan pemecahan yang sangat segera.

Salah satu pemecahan yang diusulkan bagi pengungsi Timor-Timur yang ingin menetap di wilayah Indonesia adalah melalui Pembangunan Pertanian Kawasan Ekonomi Terpadu/Resettlement Timor Barat (Kupang, TTS, TTU, Belu) Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimungkinkan karena Nusa Tenggara Timur masih mempunyai potensi sumber daya yang belum di manfaatkan secara optimal khususnya oleh masyarakat petani nelayan.



Hasil identifikasi lokasi oleh Tim Terpadu (Bappeda Tingkat I dan II, Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Pertanian, BPN, Mitra kerja/BUMN), telah menentukan potensi sasaran pemukiman di 4 (empat) Kabupaten, sebagai berikut :

- ◆ Kabupaten Kupang 5.000 HA, menampung 2.550 KK.
- ◆ Kabupaten TTS 400 HA, menampung 300 KK.
- ◆ Kabupaten TTU 6.200 HA, menampung 2.975 KK.
- ◆ Kabupaten Belu 2.981 HA, menampung 2.025 KK.

Total areal yang telah diidentifikasi seluruhnya 14.581 HA, dan dapat menampung 7.850 KK dari 14.400 KK yang ditargetkan. Tim Terpadu masih terus bekerja untuk dapat mencapai target yang telah direncanakan tersebut.

Kegiatan pembangunan barak semi permanen di Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu sementara dilaksanakan oleh pihak Pekerjaan Umum dan Mitra Kerja/BUMN PU sebagai tempat pemukiman sementara sebelum dipindahkan ke lokasi resettlement. Persiapan pembangunan pemukiman dan lahan usaha direncanakan selesai akhir Nopember 1999. Guna mendukung dan melengkapi pelaksanaan pembangunan resettlement yang sekaligus akan mendukung pengembangan Kapet, diharapkan kegiatan sektor pertanian, khususnya penyediaan agroinput dan pembinaan tingkat para petani dalam aspek teknologi pertanian dapat segera direalisasikan karena musim hujan diperkirakan akan jatuh pada akhir Nopember 1999.

h. Pembentukan Bank Pertanian

Dukungan sektor perbankan terhadap sektor pertanian yang tidak sesuai dengan harapan telah berimplikasi pada lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya produktivitas sektor pertanian. Dengan demikian untuk dapat membangun dan memperkuat sektor pertanian mutlak diperlukan adanya lembaga permodalan atau bank yang sesuai dengan karakteristik dan sifat melekat dari usaha pertanian termasuk kondisi riil dari petani dan pelaku agribisnis.



Sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga keuangan khusus untuk sektor pertanian, pada Tanggal 9 Agustus 1999 telah dilakukan penanda tangan kesepakatan bersama (MOU) antara Menteri Pertanian dengan Presiden Direktur P.T. Minarit Mudharabah Invesment, Jakarta yang juga Chief Executive Officer Megamas Offshore Investment Pte, Ltd. Singapura, tentang pembentukan Bank Pertanian Indonesia. Dalam pokok kesepakatan tersebut pemerintah selaku pihak pertama memfasilitasi terbentuknya Bank Pertanian sementara pihak kedua mempersiapkan equity khusus yang dijadikan jaminan pencarian dana lainnya dan mengambil alih Bank Duta untuk dijadikan Bank Pertanian Indonesia.

Menko Kesra dan Taskin yang bertindak atas nama pengurus Yayasan pemilik Bank Duta mendukung gagasan pengambil alihan Bank Duta menjadi Bank Pertanian. Salah satu syarat untuk menyiapkan Bank Duta menjadi Bank Pertanian ialah tersedianya "Tambahan Dana Equity" yang harus disediakan oleh investor guna memperkecil prosentase partisipasi dana Rekapitalisasi dari Pemerintah. Untuk maksud tersebut telah dibentuk Komite Pengadaan Dana untuk Bank Pertanian Indonesia.

Upaya lainnya yang telah dilakukan adalah menggalang dukungan dari Pemerintah Perancis (Departemen Keuangan dan Bank Pertanian) guna mendukung pendirian Bank Pertanian, baik dalam pendanaan maupun dalam konsultasi pengembangan sistemnya. Telah diperoleh tanggapan Pemerintah Perancis yang cukup positif mendukung upaya ini.

Mengingat sangat pentingnya keberadaan Bank Pertanian yang saai ini sudah dalam proses penyelesaian, diharapkan Departemen Pertanian dapat merealisasikan perubahan Bank Duta menjadi Bank Pertanian dalam waktu dekat.

i. Pengembangan Asuransi Pertanian

KUT yang disalurkan selama ini mencapai jumlah sangat besar namun jumlah kredit macet relatif cukup besar pula. Oleh karena itu untuk mengurangi kerugian pemerintah yang lebih besar akibat kredit macet serta untuk menjamin ketentraman dan kesejahteraan petani, telah dilakukan upaya pengembangan



asuransi pertanian yang terdiri dari asuransi kerugian tanaman pertanian dan asuransi jiwa kredit pertanian.

Konsep pertama Program Asuransi Pertanian telah dibahas pada Sidang Kabinet Bulan Juli 1999 dan disarankan untuk disempurnakan lagi. Konsep kedua yang merupakan penyempurnaan konsep sebelumnya telah dibuat pada bulan Oktober 1999.

Langkah – langkah penting yang masih harus dilakukan adalah :

- ◆ Departemen Pertanian perlu mengadakan Perjanjian Kerjasama Induk dengan Pool Asuransi Kerugian Tanaman Pertanian maupun Pool Asuransi Jiwa Kredit Pertanian.
- ◆ Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Induk, maka antara Pool Asuransi Kerugian Tanaman Pertanian dan Pool Asuransi Jiwa Kredit Pertanian dengan Bank Pelaksana dibuat Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO).
- ◆ Sebagai penjelasan dari Perjanjian Kerja sama Induk dan PKO, maka dibuat Petunjuk Pelaksanaan Program Asuransi Kerugian Tanaman Pertanian dan Program Asuransi Jiwa Kredit Pertanian.
- ◆ Pool Asuransi Kerugian Tanaman Pertanian dan Pihak Departemen Pertanian akan membahas Program Asuransi Kerugian Tanaman dengan Perusahaan Reasuransi luar negeri (Inggris) di Perancis tanggal 20 Oktober 1999.
- ◆ Sosialisasi Program Asuransi Pertanian kepada petani dan petugas lapangan di daerah.
- ◆ Mengembangkan pilot proyek Program Asuransi Pertanian, khususnya di daerah-daerah sentra produksi padi.

j. Ketersediaan Pupuk

Dalam rangka peningkatan produksi melalui produktivitas dan kualitas pertanaman, ketersediaan pupuk dengan prinsip enam tepat merupakan suatu keharusan. Namun demikian, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pembebasan tata niaga pupuk sejak bulan Desember 1998, maka penyaluran pupuk bagi sektor pertanian pada MT. 1999 sulit dipantau.



Untuk mengatasi permasalahan ini telah dibentuk Tim Interdep yang terdiri dari Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Keuangan. Tugas utama Tim ini adalah mengadakan upaya untuk membantu perusahaan importir swasta mengimpor pupuk, agar pupuk tersedia secara enam tepat.

Untuk kebutuhan MT. 1999/2000 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 sampai Maret 2000, PT. Pusri dan PT. Pertani akan mengimpor pupuk TSP, ZA, KCL, dan Rock Phosphat dengan memanfaatkan pinjaman dana dari Islamic Development Bank (IDB) senilai US \$. 70 juta dengan alokasi sebagai berikut :

- (1) PT. Pusri 257.486 ton senilai US\$. 34.395.000, yaitu TSP 30.000 ton senilai US\$.5.310.000 dengan harga US\$. 177/MT;KCL 179.486 ton senilai US\$. 26.205.000 dengan harga US\$. 146/MT; dan Rock Phosphat 48.000 ton senilai US\$. 2.880.000 dengan harga satuan US\$. 60/MT;
- (2) PT. Pertani 385.000 ton senilai US\$. 35.605.000 yaitu TSP 100.000 ton senilai US\$. 17.700.000 dengan harga US\$. 177/MT; KCL 250.000 ton senilai US\$. 15.000.000 dengan harga US\$. 60/MT; dan Rock Phosphat 35.000 ton senilai US\$. 2.405.000 dengan harga US\$.83/MT.

Upaya - upaya di atas masih tetap perlu dilanjutkan agar sasaran peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani dapat diwujudkan.

k. Sumber Daya Manusia Pertanian

Pengembangan SDM pertanian pada waktu yang akan datang perlu dirancang dan dilaksanakan berdasarkan hasil kajian yang cermat. Oleh karena itu diperlukan pengkajian berbagai angka pengembangan SDM yang meliputi antara lain :

- ◆ Mengkaji dan merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pengembangan tenaga kerja pertanian,
- ◆ Mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun pola pendidikan dasar bagi petani-nelayan,
- ◆ Mengkaji, merumus kebijakan dan menyusun standarisasi Unggulan Balai Latihan,



- ◆ Melaksanakan studi uji coba model penyuluhan pertanian interaktif,
- ◆ Melaksanakan studi model penyuluhan pertanian spesifik lokalita.

Dalam aspek peningkatan sumberdaya manusia penyuluh, diperlukan kegiatan diklat penyetaraan bagi penyuluh pertanian. Tujuan diklat penyetaraan bagi penyuluh pertanian adalah untuk meningkatkan kemampuan penyuluh di bidang penyuluhan pertanian setingkat ahli madya melalui diklat penyetaraan, sehingga mereka memiliki sertifikat setara D-3. Sasaran yang ingin dicapai adalah 4.800 penyuluh dapat menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian yang terampil. Waktu pelatihan adalah selama 4 bulan, yaitu : 1 bulan di kampus, 2 bulan di luar kampus (wilayah binaan) dan kembali 1 bulan di kampus. Untuk itu diperlukan alokasi dana yang cukup sehingga program ini dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, misalnya selesai semuanya tahun 2001.

Sebagai salah satu upaya mempersiapkan SDM pertanian di masa yang akan datang. Departemen Pertanian akan mengembangkan Kampus Pendidikan Pelatihan Pertanian di Ciawi, Bogor menjadi suatu Pusat Pendidikan Pelatihan Pertanian (Pusdiklat) untuk menyelenggarakan berbagai diklat yakni Diklat Struktural, Diklat Manajemen dan Kepemimpinan untuk para pejabat Eselon II dan III lingkup Pertanian, diklat dasar dan lanjutan untuk pejabat fungsional pertanian serta diklat lainnya maupun pertemuan – pertemuan ilmiah tentang pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan SDM Pertanian. Pembentukan Diklat tersebut dengan melebur 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yakni, Balai Penataran dan Pelatihan Pertanian (BPLP) Ciawi, Balai Pendidikan Pelatihan Fungsional Pertanian (BPPFP) Ciawi, Balai Metodologi dan Informasi Pertanian (BMIP) Ciawi dan Balai Pegawai Pertanian (BLPP) Ciawi.

Pengembangan status UPT Diklat Ciawi ini dimungkinkan karena sarana dan prasarana yang ada cukup memadai dan tenaga pelatihan yang memenuhi kualifikasi mencukupi. Usulan pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian tersebut sudah diajukan ke Kantor Menkowsabang dan Pan, dan diharapkan bulan oktober sudah diperoleh surat persetujuan.



Dalam hal pembinaan karir pegawai, telah dibentuk jabatan fungsional, yang terakhir enam jabatan fungsional baru dan ada dua jabatan yang sedang diusulkan/dibahas di Kantor Menko Wasbangpan. Pembinaan dan pengembangan pegawai melalui jabatan fungsional ini sangat penting artinya, yang merupakan salah satu implementasi dari UU No. 22/1999.

1. Pembinaan KAPET Mbay, Nusa Tenggara Timur dan Batui Sulawesi Tengah

Salah satu strategi Pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah dengan mengembangkan satu kawasan andalan di setiap propinsi. Kawasan andalan terpilih tersebut disebut dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1996 dan kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998. Menurut Keppres No.89 pengertian KAPET adalah suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan (1) Memiliki potensi untuk cepat tumbuh (2) Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya (3) Memerlukan dana investasi besar bagi pengembangannya.

Dari 14 KAPET yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden, dua diantaranya yaitu KAPET Mbay dan Batui dikoordinir oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengelola KAPET Mbay dan Batui. Dalam rangka operasionalisasi KAPET, telah dilakukan Pemantapan Organisasi KAPET Mbay dan Batui dengan mengukuhkan struktur organisasi Badan Pengelola Kawasan Kapet tersebut melalui pengangkatan Para Direktur dan anggota Badan Pengelola.

Langkah - langkah yang perlu dilanjutkan dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan pengembangan Kapet tersebut adalah :

- 1) Penyusunan Rencana Induk (RIK) Kapet mencakup
 - a. Rencana strategis (Strategic Plan)
 - b. Rencana Investasi (Investment Plan)
 - c. Rencana Penataan Ruang (Spatial Plan)
 - d. Rencana Pengembangan Sumberdaya manusia (Man Power Plan)
- 2) Sosialisasi keberadaan KAPET kepada instansi lintas sektor



- dan sub sektor baik di tingkat pusat maupun di wilayah.
- 3) Peningkatan promosi investasi kepada investor dalam dan luar negeri. Untuk itu diperlukan persiapan berbagai informasi tentang peluang usaha dan insentif investasi yang menyertainya.
 - 4) Mengembangkan jaringan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya melalui dukungan program dan proyek sektor terkait, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
 - 5) Melengkapi personil organisasi Badan Pengelola sampai tingkat pelaksana operasional.

m. Pengkajian Organisasi Departemen Pertanian

Dengan adanya UU Nomor 22/1999 dan perubahan pendekatan pembangunan, Pimpinan Departemen Pertanian merasakan perlunya dilakukan pengkajian organisasi Departemen Pertanian. Untuk itu melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 43/Kpts/KP.150/2/1999 telah dibentuk Tim Pengkajian Kelembagaan/Organisasi Departemen Pertanian. Tim telah menyelesaikan tugasnya dan telah melaporkan dalam suatu buku yang berjudul “Kajian Kelembagaan Birokrasi Pertanian Mendukung Pertanian Abad 21”

Dalam hal struktur organisasi, beberapa kesimpulan utama adalah :

- (1) Lima tahun pemerintahan kabinet hasil Pemilu 1999 termasuk dalam era reformasi. Oleh karena itu transformasi politik-sosial-ekonomi dari masa Kabinet Pembangunan ke dalam era Kabinet Reformasi berlangsung secara bertahap, mengikuti pola penyesuaian incremental mengikuti Konsep Masyarakat Madani. Transformasi ini mengikuti *highest leverage*, yang ditemukan dalam kajian, yang akan mampu memberikan dampak terbesar terhadap kinerja pertanian dan kebijakan serta strategi pembangunan pertanian mengikuti telaah lingkungan strategis.
- (2) Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Kementerian Pertanian serta strategi pembangunan pertanian yang didasarkan pada dalil dan prinsip pembangunan berkelanjutan, Kementerian Pertanian harus ditunjang oleh suatu “Badan Antar Kementerian”. Badan yang dapat mempercepat implementasi visi dan strategi pembangunan,



khususnya tentang ketahanan pangan (*food resilience*), jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, kewenangan Pemerintah Pusat Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 pasal 7 dan yang sesuai dengan wawasan pertanian masa depan itu disebut *Badan Ketahanan Pangan Nasional*. Badan ini kelak merangkum kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan beranggotakan wakil – wakil dari kementerian – kementerian yang membidangi pertahanan dan keamanan nasional, transportasi, politik dalam negeri, politik luar negeri, alokasi anggaran, perbankan dan perusahaan baik negara maupun swasta. Badan ini dikepalai oleh Menteri Pertanian.

- (3) Fungsi pelaksanaan yang termasuk “carry over” Kabinet Pembangunan ditransformasikan ke dalam manajemen baru mengikuti mekanisme hubungan Pusat dan Daerah. Jumlah dan macam “Direktorat Jenderal” dan “Badan” didasarkan pada fungsi – fungsi : (a) pengembangan dan pembinaan usaha pertanian (agribisnis), (b) pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pertanian, (c) pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya pertanian, (d) pelestarian alam dan lingkungan hidup, (e) penelitian dan pengembangan pertanian; dan (f) pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Hasil kajian Tim ini kiranya dapat dijadikan referensi utama dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian yang akan datang

n. Alternatif Rumusan Program Utama Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian periode 2000-2004 masih akan diwarnai oleh upaya pemulihan ekonomi akibat krisis dan diharapkan akan berlanjut dengan tahap pertumbuhan. Untuk itu peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi masyarakat Indonesia, pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan ketahanan pangan merupakan komponen utama ketahanan nasional.



Dalam pada itu dinamika lingkungan strategis baik global, regional maupun domestik telah membawa seluruh sektor perekonomian pada situasi pasar yang sangat kompetitif. Oleh karena itu peningkatan efisiensi dan daya saing merupakan komponen yang sangat penting agar usaha pertanian dapat berkembang dan memberikan penghasilan yang layak bagi para pelakunya. Daya saing ini pula menentukan kemampuan produk pertanian bertahan menghadapi masuknya produk impor sekaligus mampu menembus pasar ekspor. Hai ini merupakan kunci bagi upaya menghemat maupun meningkatkan penghasilan devisa.

Pada era reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan, diantaranya adanya kehendak untuk memberi peran yang besar kepada daerah dan masyarakat secara luas. Peran pemerintah pusat yang masih kental dan dominan menjadikan program-programnya kurang efektif untuk menstimulasi dan memfasilitasi masyarakat dan kurang aspiratif terhadap dinamika perubahan tuntutan masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai ketidakpuasan.

Menyikapi perkembangan tersebut maka kebijakan perencanaan pembangunan termasuk program-programnya perlu disesuaikan. Pengalaman dan kajian terhadap program pada periode yang lalu memberikan indikasi perlunya struktur program yang lebih fleksibel untuk periode ke depan, khususnya dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam antar daerah. Alternatif Program Utama Pembangunan Pertanian adalah: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP), (2) Program Peningkatan Efisiensi Usaha dan Ekspor Pertanian (PUE), dan (3) Program Pengembangan Prasarana, Sumberdaya dan Kelembagaan Pertanian (PSK). Di dalam ketiga program tersebut dapat dikembangkan sub program yang selanjutnya implementasinya diisi oleh proyek-proyek dan kegiatan pembangunan, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masing-masing daerah.



o. Paradigma Pengawasan Pembangunan

Pada era reformasi, metode pengawasan pembangunan pertanian berubah dari pengawasan sebagai “watch dog” yang cenderung dianggap menakut – nakuti, menjadi pengawasan yang menempatkan diri sebagai counselling partner. Pendekatan ini menempatkan pengawas sebagai mitra bagi unsur – unsur Departemen Pertanian yang diperiksa. Pengawasan pada hakekatnya membantu pimpinan instansi mengarahkan kegiatan agar terlaksana sesuai rencana dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara efektif dan efisien. Paradigma pengawasan ini seyogyanya dilanjutkan penerapannya di masa datang ini.



VI. PENUTUP

Pembangunan pertanian berkelanjutan pada masa datang bukan lagi sekedar bertumpu pada persoalan produksi semata-mata, akan tetapi berwawasan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Basis dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani ini adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan, pendapatan, serta upaya perbaikan pelestarian sumber daya dan lingkungan hidup disertai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapat prioritas yang tinggi dalam pembangunan pertanian pada era reformasi ini.

Eksistensi petani, peternak dan nelayan sebagai subyek pembangunan seyogyanya semakin menonjol. Untuk itu hubungan pembinaan yang bersifat "pengarahan" secara bertahap akan dirubah menjadi hubungan yang bersifat dialog untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Proses pembinaan harus ditujukan untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak kepada petani, peternak dan nelayan sesuai aspirasinya yang paling humanistik yaitu peningkatan kesejahteraan.

Bertitik tolak dari prespektif di atas, maka kerangka strategi pembangunan pertanian pada era reformasi hendaknya dititikberatkan pada pengembangan agribisnis. Pembangunan pertanian tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam suatu kesatuan sistem agribisnis yang mampu memanfaatkan sumber daya domestik secara maksimal. Strategi ini sekaligus merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan, yang antara lain menyediakan pangan yang berkualitas dan cukup bagi masyarakat, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh dan efisien, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan penerimaan devisa, yang sekaligus untuk lebih memperkuat ketahanan nasional.

Peran di atas menjadikan pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Keinginan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan (leading sector) dalam



pembangunan ekonomi akan terwujud apabila dirumuskan menjadi komitmen nasional. Komitmen tersebut secara formal harus tercermin dalam program nasional yang merupakan landasan legal untuk memperoleh dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan keinginan tersebut, pada era reformasi ini masyarakat pertanian harus terbuka terhadap segala kemungkinan perubahan dalam memajukan pembangunan pertanian, seperti dalam hal penyesuaian organisasi/kelembagaan, peran aparat dalam tata hubungannya dengan masyarakat petani, peran pemerintah/ institusi pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah, kebijakan dan strategi pembangunan, dan struktur program-program dan proyek-proyek pembangunan pertanian. Selanjutnya, penyiapan sumberdaya manusia menjadi faktor kunci bagi kelancaran proses pembaharuan tersebut.



LAMPIRAN



Tabel 3.1. : Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan DIP TA. 1999/2000 menurut Unit Kerja Utama dan Alokasi Pusat - Daerah

(Rp.Juta)

No. Unit Kerja Utama	Pusat			Daerah			Total		
	RM	BLN	Total	RM	BLN	Total	RM	BLN	Total
1. Sekretariat Jenderal	19.429,9	4.561,1	23.991,0	64.942,3	0,0	64.942,3	84.372,1	4.561,1	88.933,2
2. Ditjen TPH	51.585,2	166.845,9	218.431,1	88.808,2	118.529,2	207.337,4	140.393,4	285.375,1	425.768,5
3. Ditjen Peternakan	15.329,3	48.523,9	63.853,2	17.544,0	92.792,7	110.336,7	32.873,3	141.316,6	174.189,9
4. Ditjen Perikanan	19.583,0	33.210,8	52.793,8	24.358,3	133.809,2	158.167,5	43.941,3	167.020,0	210.961,3
5. SP. Bimas	4.951,4	0,0	4.951,4	56.050,3	0,0	56.050,3	61.001,8	0,0	61.001,8
6. Badan Diklat	19.866,1	0,0	19.866,1	40.066,2	0,0	40.066,2	59.932,3	0,0	59.932,3
7. Badan Litbang	74.437,7	131.168,2	205.605,9	0,0	0,0	0,0	74.437,7	131.168,2	205.605,9
8. Badan Agribisnis	9.675,3	0,0	9.675,3	18.127,8	0,0	18.127,8	27.803,1	0,0	27.803,1
Jumlah	214.857,9	384.309,9	599.167,8	309.897,1	345.131,1	655.028,2	524.755,0	729.441,0	1.254.196,0

Tabel 3.2. : Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan DIP TA. 1999/2000 menurut Program Pembangunan dan Alokasi Pusat – Daerah

(Rp. Juta)

No.	Program	Pusat			Daerah			Total		
		RM	BLN	Total	RM	BLN	Total	RM	BLN	Total
	Program Utama	181.843,8	352.806,8	534.650,6	296.294,1	345.131,0	641.425,1	478.137,9	697.937,8	1.176.075,7
1.	Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu	14.213,6	0,0	14.213,6	98.732,9	0,0	98.732,9	112.946,5	0,0	112.946,5
2.	Pembangunan Usaha Pertanian	34.175,5	98.442,2	132.617,7	43.397,8	0,0	43.397,8	77.573,3	98.442,2	176.015,5
3.	Diversifikasi Pangan dan Gizi	5.751,8	0,0	5.751,8	19.036,8	0,0	19.036,8	24.788,6	0,0	24.788,6
4.	Pengembangan Sumberdaya, Saran dan Prasarana Pertanian	127.702,9	254.364,6	382.067,5	135.126,6	345.131,0	480.257,6	262.829,5	599.495,6	862.325,1
	Program Penunjang	33.014,1	31.503,1	64.517,2	13.603,0	0,0	13.603,0	46.617,1	31.503,1	78.120,2
5.	Pembinaan Daerah Pantai	668,6	0,0	668,8	0,0	0,0	0,0	668,8	0,0	668,8
6.	Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	631,0	213,4	844,4	0,0	0,0	0,0	613,0	213,4	844,4
7.	Pendidikan Kedinasan	681,0	0,0	681,0	6.721,4	0,0	6.721,4	7.402,4	0,0	7.402,4
8.	Penguasaan Teknologi	28.238,2	31.289,7	59.527,9	0,0	0,0	0,0	28.238,2	31.289,7	59.527,9
9.	Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan	1.136,5	0,0	1.136,5	0,0	0,0	0,0	1.136,5	0,0	1.136,5
10.	Penyempurnaan & Pengembangan Statistik	1.187,4	0,0	1.187,4	0,0	0,0	0,0	1.187,4	0,0	1.187,4
11.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	471,2	0,0	471,2	6.881,6	0,0	6.881,6	7.352,8	0,0	7.352,8
	Jumlah	214.857,9	384.309,9	599.167,8	309.897,1	345.131,0	655.028,1	524.755,0	729.441,0	1.254.196,0



**Tabel 4.1. : Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 1997 - 1999**

Komoditi	1997	1998 *)	1999 **)	Pertumbuhan	
				(97 - 98)	(98 - 99)
				----- (%) -----	
Luas Panen (Ha)					
Padi	11.140.594	11.730.325	11.624.065	5,29	(0,91)
Jagung	3.355.224	3.847.813	3.452.398	14,68	(10,28)
Kedele	1.119.079	1.095.071	1.122.272	(2,15)	2,48
Kacang Tanah	628.142	651.098	610.992	3,65	(6,16)
Kacang Hijau	294.184	339.210	329.875	15,31	(2,75)
Ubi Jalar	195.436	202.093	199.409	3,41	(1,33)
Ubi Kayu	1.243.336	1.205.353	1.275.421	(3,05)	5,81
Produksi (Ton)					
Padi	49.377.054	49.236.692	49.633.584	(0,28)	0,60
Jagung	8.770.851	10.169.488	9.134.404	15,95	(10,18)
Kedele	1.356.891	1.305.640	1.275.115	(3,78)	(2,34)
Kacang Tanah	6.883.455	692.357	660.418	(89,94)	(4,61)
Kacang Hijau	261.707	306.095	286.874	16,96	(6,28)
Ubi Jalar	1.847.492	1.935.044	1.880.616	4,74	(2,81)
Ubi Kayu	15.134.021	14.696.203	15.421.885	(2,89)	4,94
Produktivitas (Ku/Ha)					
Padi	44,32	41,97	42,61	(0,53)	1,52
Jagung	26,14	26,43	26,46	1,11	0,11
Kedele	12,13	11,92	11,36	(1,73)	(4,71)
Kacang Tanah	10,96	10,63	10,81	(3,01)	1,65
Kacang Hijau	8,90	9,02	8,70	1,35	(3,63)
Ubi Jalar	95,00	96,00	94,31	1,05	(1,50)
Ubi Kayu	122,00	122,00	120,92	0,00	(0,83)

Keterangan : *) Angka Tetap 1998
**) Angka Ramalan 1999



Tabel 4.2. : Rencana dan Realisasi Areal Tanam Intensifikasi Padi, Kedelai dan Jagung TA 1997/1998 sampai TA 1999/2000

(ribu ha)

TA/MT	Padi			Kedelai			Jagung		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
TA 1997/1998	11.249	11.203	99,60	1.744	1.111	63,70	3.691	3.450	93,37
MT 1997	4.002	3.945	98,57	861	579	67,25	1.180	977	82,85
MT 1997/1998	7.247	7.259	100,16	884	532	60,24	2.515	2.472	98,31
TA 1998/1999	11.443	12.337	107,81	1.666	1.231	73,90	3.768	3.801	100,88
MT 1998	4.082	4.846	118,74	854	611	71,58	1.263	1.397	110,64
MT 1998/1999	7.361.560	7.490.934	101,76	812	620	76,35	2.505	2.404	95,96
TA 1999/2000	11.416	1.739	15,23	1.552	167	10,87	3.787	287	7,57
MT 1999	4.197	1.739	41,44	762	169	22,15	1.264	287	22,67
MT 1999/2000	7.219		0,00	791		0,00	2.523		0,00



Tabel 4.3. Perkembangan Populasi Ternak 1997 - 1999

Jenis Ternak	Populasi (000 ekor)			Pertumbuhan (%)	
	1997	1998	1999 *)	(97 - 98)	(98- 99)
Sapi Potong	11.938,9	11.633,9	12.102,5	(2,55)	4,03
Sapi Perah	334,4	322,0	334,0	(3,71)	3,7
Kerbau	3.064,5	2.829,3	2.859,0	(7,67)	1,05
Kambing	14.162,5	13.560,4	14.120,5	(4,25)	4,13
Domba	7.697,7	7.144,0	7.502,4	(7,19)	5,02
Babi	8.232,8	7.797,6	9.353,0	(5,29)	19,95
Kuda	582,3	566,5	578,8	(2,17)	2,17
Ayam Buras	260.834,7	253.133,4	265.998,4	(2,95)	5,08
Ayam Petelur	70.622,8	38.861,3	41.966,6	(44,97)	7,99
Ayam Pedaging	641.373,8	354.003,5	418.940,5	(44,81)	18,34
Itik	30.320,0	25.950,0	26.284,0	(14,41)	1,28

Keterangan : *) Angka Sementara

**Tabel 4.4. : Produksi Daging, Telur dan Susu Per Jenis Ternak
1997 - 1999**

Jenis Ternak	Populasi (000 ekor)			Pertumbuhan (%)	
	1997	1998	1999 *)	(97 - 98)	(98 - 99)
Daging	1.555	1.228	1.322	(21,02)	7,67
1) Sapi Potong	354	343	354		
2) Kerbau	47	46	45		
3) Kambing	65	48	47		
4) Domba	42	34	37		
5) B a b I	146	135	138		
6) K u d a	2	2	1		
7) Ayam Buras	314	294	318		
8) Ayam Ras Pet.	49	26	27		
9) Ayam Pedaging	515	285	337		
10) Itik	20	16	18		
Telur	765	530	546	(30,75)	3,02
(1) Ayam Buras	124	126	131		
(2) Ayam Petelur	483	267	275		
(3) Itik	158	137	140		
S u s u	423	375	384	(11,40)	2,37

Keterangan : *) Angka Sementara



Tabel 4. 5. : Perkembangan Produksi Perikanan, 1997-1999

Usaha Perikanan	1997	1998 *)	1999 *)	Pertumbuhan	
	(000 ton)			97-98	98-99
				----- (%) -----	
Perikanan laut	3.613,0	3.837,0	4.391,3	6,20	14,45
Perikanan darat	966,8	1.000,0	1.330,5	3,43	33,05
a. Perairan umum	304,3	306,0	408,2		33,40
b. Budidaya	662,6	694,0	922,3	4,75	32,89
- Tambak	370,3	390,0	527,6	5,33	35,28
- Kolam	171,8	180,0	248,6	4,79	38,09
- Karamba	26,2	28,0	45,1	6,91	61,20
- Sawah	94,3	96,0	101,0	1,77	5,19
Jumlah	4.579,8	4.837,0	5.721,8	5,62	18,29

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Perkiraan

**Tabel 4.6. Perkembangan Ekspor Hasil Perikanan,
1997-1999**

Hasil Perikanan	1997	1998 *)	1999 **)	Pertumbuhan	
				97-98	98-99
		(ton)			
Volume	574.419	656.707	818.065	14,33	24,57
Udang	98.043	142.116	197.655	52,74	-31,29
Tuna/cakalang	82.868	104.330	132.367	25,90	26,87
Rumput laut	12.699	15.213	170.560	-58,95	1.253,54
Lainnya	385.809	405.048	517.483	4,99	27,76
		(000US\$)			
Nilai	1.686.168	1.701.152	2.477.231	0,89	45,62
Udang	1.011.135	1.009.762	1.399.129	-0,14	38,56
Tuna/cakalang	189.433	215.134	341.712	13,57	58,84
Rumput laut	10.522	5.936	31.752	-43,58	434,91
Lainnya	475.078	470.320	744.598	-1,00	58,32

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Perkiraan



Tabel 4.7. : Perkembangan Impor Hasil Perikanan, 1997-1999

Rincian	1997	1998 *)	1999 **)	Pertumbuhan	
				97-98	98-99
	(ton)				
Volume	151.802	61.142	53.260	-59,72	-12,89
Ikan segar/beku	11.876	4.236	3.700	-64,33	-12,65
Ikan dalam kaleng	735	1.223	1.570	66,39	28,37
Tepung ikan	115.180	35.291	24.400	-69,36	-30,86
Tepung lainnya	5.390	4.296	3.050	-20,30	-29,00
Lainnya	18.621	16.096	20.540	-13,56	27,61
	(000US\$)				
Nilai	122.369	44.893	39.360	-63,31	-12,32
Ikan segar/beku	8.838	4.569	3.990	-48,30	-12,67
Ikan dalam kaleng	1.689	2.745	3.520	62,52	28,23
Tepung ikan	77.733	24.912	17.220	-67,95	-30,88
Tepung lainnya	3.261	2.704	1.920	-17,08	-28,99
Lainnya	30.848	9.963	12.710	-67,70	27,57

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Perkiraan



